

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI PULAU JAWA**

**TAHUN 2010-2016**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Nama : Ellza Alfya Rahma**

**Nim : 14313251**

**Jurusan : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2018**

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN

PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI PULAU JAWA

TAHUN 2010-2016

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Strata I

Jurusan Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ellza Alfya Rahma

Nomor Mahasiswa : 14313251

Jurusan : Ilmu Ekonomi



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Januari 2018

Penulis,



Elza Alfya Rahma

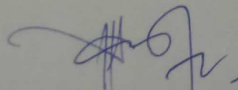
**PENGESAHAN**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**  
**KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI PULAU JAWA**  
**TAHUN 2010-2016**

Nama : Ellza Alfya Rahma  
Nomor Mahasiswa : 14313251  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 9 Januari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing,



Heri Sudarsono, S.E., M.Ec

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN  
ANTAR PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2016

Disusun Oleh : ELLZA ALFYA RAHMA

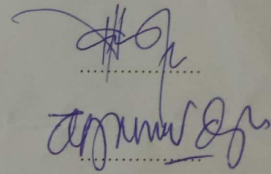
Nomor Mahasiswa : 14313251

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Kamis, tanggal: 8 Februari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Heri Sudarsono, SE.,MEc

Penguji : Agus Widarjono, SE., MA.,Ph.D



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## HALAMAN MOTTO

**Kecil dibina, remaja terjaga, muda berkarya, hidup sederhana, keluarga sejahtera, tua kaya raya, mati masuk surga.**

**Dadio Gurune Jagad**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Rokhim dan Ibu Minarsih serta Adik-adik saya yaitu Ellga Adityas Reivaldy dan Zona Alfareiz Ramadhan.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk dan syafa'at kepada umat sehingga terlepas dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini dengan baik berkat doa, dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Yth. Bapak Akhsyim Affandi, M.A selaku Ka-Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Bapak Heri Sudarsono S.E, M.Ec selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang ditengah kesibukannya dengan sabar dan penuh perhatian membimbing serta memberikan dukungan moril hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha dan Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.



5. Yth. Bapak Anjar sang juru kunci jurusan IE yang banyak membantu dalam hal akademik.
6. Bapak Rokhim dan Ibu Minarsih tercinta, atas jerih payah, cucuran keringat, Do'a, dukungan serta nasehat yang telah diberikan selama ini yang tak mungkin terbalaskan. Terimakasih pula kepada adik-adik saya yaitu Ellga Adityas Reivaldy dan Zona Alfareiz Ramadhan dan seluruh keluarga saya yang terus dan selalu mendukung saya.
7. Sahabat-sahabat ku Alifah, Indri, Agnesia, seluruh angkatan Ilmu Ekonomi 2014 serta teman-teman KKN angkatan 55 unit 353 terima kasih atas segala bantuan serta dukungannya untuk saya.
8. Reza Martha Bella Estanto Putri, terimakasih telah membantu saya dalam setiap kesulitan mencari data skripsi.
9. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua.

Penulis sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu pun dengan skripsi ini. Oleh karena itu penulis terbuka dan senang hati menerima kritik agar menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Dan harapan penulis skripsi ini dapat berguna bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 9 Januari 2018

Ellza Alfya Rahma

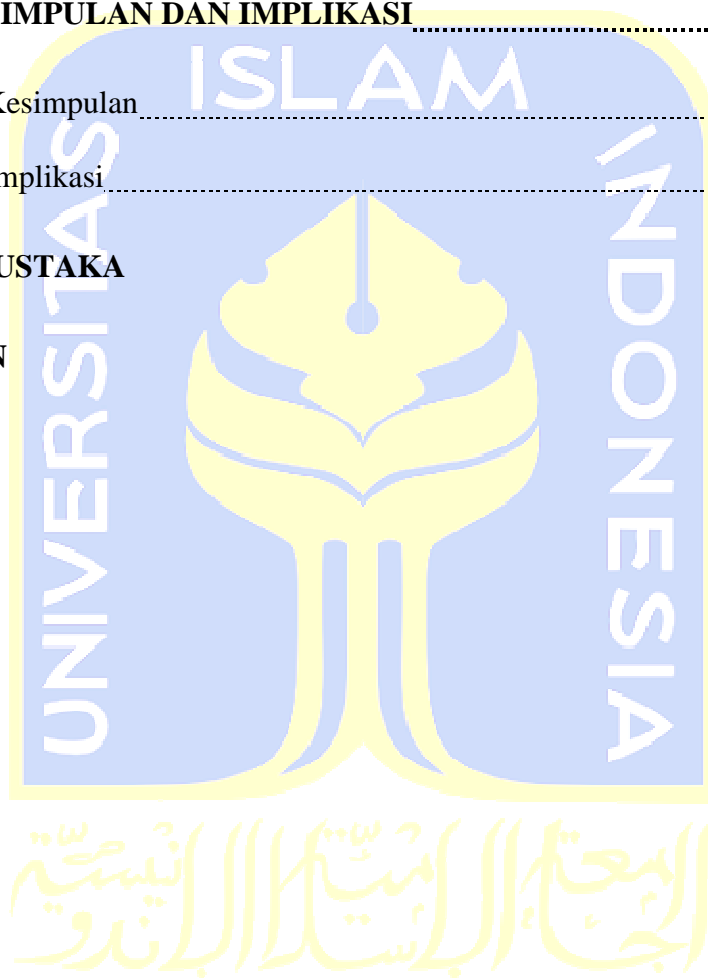
## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
HALAMAN ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	9
1.3. Rumusan Masalah .....	10

1.4. Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1. Kajian Pustaka .....	13
2.2. Landasan Teori .....	19
2.2.1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	19
2.2.1.1. Kurva Lorenz .....	21
2.2.1.2. Indeks Gini .....	23
2.2.2. Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan.....	24
2.2.2.1. PDRB perkapita.....	24
2.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia .....	26
2.2.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	29
2.2.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	33
2.3. Kerangka Pemikiran .....	36
2.4. Hipotesis Penelitian .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	37
3.2. Definisi Operasional Variabel .....	37
3.2.1. Variabel Dependen.....	38
3.2.2. Variabel Independen.....	38
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	40
3.4. Metode Analisis.....	40

3.5. Estimasi Model Regresi Data Panel .....	41
3.5.1. Pooled Least Square ( <i>Common Effect</i> ) .....	41
3.5.2. Pendekatan Efek Tetap ( <i>Fixed Effect</i> ) .....	42
3.5.3. Pendekatan Efek Random ( <i>Random Effect</i> ) .....	42
3.6. Penentuan Model Estimasi .....	43
3.6.1. Chow Test (Uji Chow) .....	43
3.6.2. Uji Hausman .....	44
3.7. Uji Hipotesis .....	45
3.7.1. Uji Koefisien Determinan (Uji $R^2$ ) .....	45
3.7.2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) .....	46
3.7.3. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1. Deskriptif Data Penelitian .....	49
4.2. Hasil Dan Analisis Data .....	50
4.2.1. Pemilihan Model Regresi .....	50
4.2.1.1 Uji Chow .....	51
4.2.1.2. Uji Hausman .....	52
4.2.1.3. Model Estimasi <i>Fixed Effect</i> .....	53
4.3. Pengujian Hipotesis .....	55
4.3.1. Uji Determinan ( $R^2$ ) .....	55

4.3.2. Uji Parsial (Uji F).....	56
4.3.3. Uji Individu (Uji T).....	57
4.4. Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	60
4.5. Analisis Antar Provinsi Di Pulau Jawa.....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI</b> .....	<b>67</b>
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Implikasi.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

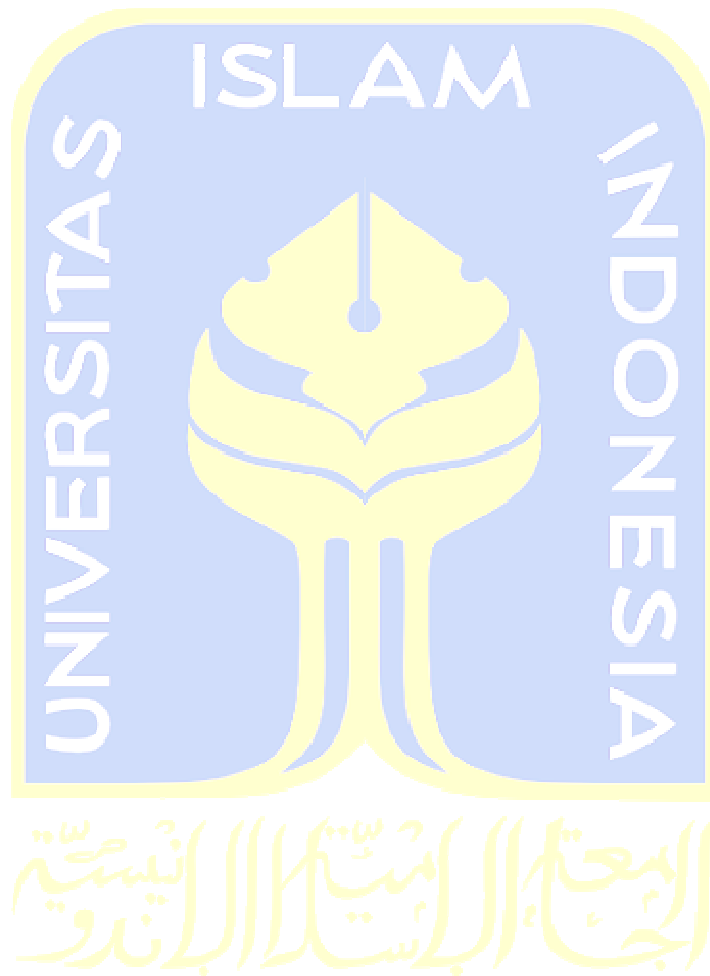


## DAFTAR TABEL

1.1. Indeks Gini Indonesia Tahun 2010-2016 (persen).....	3
1.2. PDB perkapita ADHK 2010 Indonesia Tahun 2010-2016 (ribu rupiah). .....	4
1.3. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010-2016 (persen).... .....	6
1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2010-2016 (persen) .....	7
1.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2010-2016 (persen) .....	8
2.1. Kajian Pustaka.....	18
4.1. Hasil Uji Chow.....	51
4.2. Hasil Uji Hausman.....	52
4.3. Hasil Regresi Fixed Effect.....	53
4.4 Hasil Uji Determinan ( $R^2$ ).....	55
4.5. Hasil Uji Parsial (Uji F).....	56
4.6. Hasil Uji Individu (Uji T).....	57
4.7. Perbedaan Koefisien antar Provinsi di Pulau Jawa.....	64

## DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Pemikiran.....	36
------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Data Indeks gini, PDRB perkapita, IPM, TPT, TPAK antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016
- Lampiran II Hasil Regresi Pooled Least Square (*Common Effect*)
- Lampiran III Hasil Regresi *Fixed Effect* Model
- Lampiran IV Hasil Regresi *Random Effect* Model
- Lampiran V Hasil Regresi Uji Chow
- Lampiran VII Hasil Regresi Uji Hausman





## ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010 sampai dengan 2016. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini diantaranya yaitu PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan *software Eviews 8*. Data panel yaitu gabungan antara data time series berupa urutan waktu yang digunakan yaitu tahun 2010-2016 dan data *cross section* yaitu berupa urutan lintang yaitu berupa 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan total jumlah observasi yaitu 42. Adapun model yang paling tepat dalam penggunaan data panel adalah *fixed effect Model*. Adapun hasil yang diperoleh bahwa variabel PDRB perkapita, IPM dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016. Sedangkan variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016.

**Kata kunci :** Ketimpangan Pendapatan, PDRB Per Kapita, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Ketimpangan yang terjadi di setiap daerah adalah fenomena yang biasa terjadi apabila suatu daerah sedang melakukan proses pembangunan. Mulanya terjadinya ketimpangan antar daerah ini karena terdapat perbedaan dalam sumber daya alam yang tersedia serta kondisi geografisnya. Permasalahan ini yang membuat setiap daerah memiliki perbedaan dalam proses pembangunan dan perbedaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Maka tidak heran apabila pada suatu daerah ada yang tergolong daerah yang maju (developed region) dan daerah yang tergolong daerah yang terbelakang (underdeveloped region). Karena adanya proses pembangunan di setiap daerah yang akan menimbulkan terjadinya ketimpangan, maka perlu dilakukan pembenahan dalam membuat suatu kebijakan sehingga tidak akan terjadi lagi ketimpangan di setiap daerah (Sjafrizal, 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisikan tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang berisikan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu tujuan dasar mengimplementasikan desentralisasi dalam hal politik, administrasi serta fiskal yang bertujuan untuk mewujudkan Otonomi Daerah. Adapun isi dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yaitu adanya pembagian dalam pembagian pelimpahan wewenang serta fungsinya (power

sharing) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. selain itu isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yaitu mengelola atau mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (finansial sharing) terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai akibat adanya pembagian pelimpahan kewenangan. Dalam UU Nomor 22 dan Nomor 25 ini lebih menitik beratkan bahwa dalam pengembangan otonomi daerah yang akan di laksanakan harus lebih memperhatikan adanya prinsip demokrasi, keterlibatan masyarakat, pemerataan, keadilan, dan lebih memperhatikan adanya potensi serta keragaman sumber daya yang dimiliki daerah. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, melalukan peningkatan peran serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengukur ketimpangan pendapatan menurut BPS yang terjadi antar masyarakat dapat dilihat menggunakan indeks gini (gini rasio). Mengukur ketimpangan dengan menggunakan indeks gini berbeda dengan indeks theil. Kisaran angka dalam indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Apabila angka indeks gini mendekati angka 0 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin rendah (merata) namun ketika mendekati 1 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin tinggi (melebar).

**Tabel 1.1**  
**Indeks Gini Indonesia (%)**

Tahun	Gini Rasio
2012	0,41
2013	0,41
2014	0,41
2015	0,41
2016	0,40

(Sumber : BPS Sulawesi Selatan)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa indeks gini Indonesia pada tahun 2012-2016. Pada tahun 2012-2015 angka indeks gini Indonesia tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu dengan angka indeks gini sebesar 0,41% tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,40%. Salah satu indeks gini tertinggi di Provinsi Indonesia tahun 2016 adalah Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa yaitu sebesar 0,41%. Bahkan angka indeks gini Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa barat ini melebihi indeks gini Indonesia pada tahun 2016 (BPS 2017). Namun secara umum indeks gini indonesia masih tergolong ketimpangan sedang.

Kebijakan otonomi daerah yang sudah diupayakan serta kebijakan lainnya yang dilakukan dengan tujuan agar pembangunan antar wilayah dapat lebih merata, namun adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik antar wilayah ternyata masih menyisakan beberapa masalah seperti perbedaan kandungan sumber daya alam yang tersedia di setiap wilayah, perbedaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana serta persebaran investasi yang belum merata yang menimbulkan adanya wilayah yang terbelakang. Hal tersebut terlihat dengan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan perkapita antar

masyarakat dalam suatu Provinsi (Darzal, 2016). Terjadinya ketimpangan pendapatan merupakan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diperoleh setiap masyarakat yang ditandai dengannya adanya segelintir masyarakat saja yang menikmati sebagian besar pendapatan nasional dan sebagian besar masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh ataupun karyawan hanya merasakan sedikit dari pendapatan nasional (Djojohadikusumo, 1954).

**Tabel 1.2**

**PDB Perkapita ADHK 2010 Indonesia (Ribu Rupiah)**

Tahun	PDRB
2012	31.484,5
2013	32.781,0
2014	33.965,4
2015	35.161,9
2016	36.462,5

(Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia)

Dari tabel 1.2 diatas, PDB Indonesia terus mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar Rp. 31.484,5 menjadi Rp. 36.462,5 pada tahun 2016. Secara umum pendapatan perkapita selalu mengalami peningkatan. Namun peningkatan pendapatan perkapita ini hanya sebagian golongan masyarakat yang merasakannya. Terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah dapat dilihat melalui kontribusi sektor ekonomi antar berbagai pulau di Indonesia. pada tahun 2010-2016 kontribusi ekonomi tertinggi di Indonesia masih terus didominasi oleh pulau jawa, yaitu pada tahun 2016 mencapai 58,49%. Hal ini yang menunjukkan bahwa struktur perekonomian di Indonesia masih terus di dominasi oleh pulau jawa. Namun hal ini berbanding terbalik dengan besarnya ketimpangan pendapatan yang terjadi di setiap Provinsi di Indonesia. Terdapat beberapa

Provinsi di Pulau Jawa yang ternyata memiliki ketimpangan pendapatan terbesar dan melebihi ketimpangan pendapatan nasional pada tahun 2010-2016. Adapun kontribusi struktur ekonomi paling rendah menurut pulau di Indonesia adalah itu pulau maluku dan papua yaitu sebesar 2,46% pada tahun 2016.

Selain memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan tingkat PDRB Perkapita suatu wilayah juga namun harus memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Sering kali ditemukan diberbagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga kualitas pembangunan manusianya masih sangat rendah. Pencapaian yang diharapkan yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai suatu negara mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Terdapat beberapa model yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan menurut pengembangan dunia internasional. Dimana konsep dalam pembangunan perekonomian yaitu dengan menitikberatkan pada pertumbuhannya (economic growth), pembangunan dalam kualitas sumber daya manusia (human resource development), adanya kebutuhan dasar (basic needs) serta adanya kesejahteraan dalam masyarakat (social welfare) (BPS, 2011).

Kesejahteraan antar masyarakat sebenarnya yang diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia yaitu dengan melihat dari bidang pendidikan, kesehatan serta pendapatan (kesejahteraan pembangunan). Rendahnya angka Indeks pembangunan manusia menyebabkan produktivitas yang di hasilkan oleh masyarakat juga menurun dan kemudian berdampak pada pendapatan masyarakat yang juga mengalami penurunan. namun apabila angka

indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan akan membuat produktivitas masyarakat akan meningkat dan kemudian membuat pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan. Namun kenyataannya setiap daerah memiliki indeks pembangunan yang berbeda-beda pula sehingga membuat indeks pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan adanya ketimpangan pendapatan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

**Tabel 1.3**

**Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (%)**

Tahun	IPM
2012	67,70
2013	68,31
2014	68,90
2015	69,55
2016	70,18

(Sumber : BPS Indonesia)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Dalam pengukuran tinggi rendahnya IPM ada 3 yaitu yaitu ketika indeks pembangunan manusia  $> 80$  maka termasuk sangat tinggi, indeks pembangunan manusia antara 70-80 maka termasuk tinggi dan indeks pembangunan manusia antara 60-70 maka termasuk sedang. Pada tahun 2016 indeks pembangunan manusia yaitu sebesar 70,18% dari sebelumnya yang hanya sebesar 67,70% pada tahun 2012. Indeks pembangunan manusia di Indonesia dari tahun 2016 juga tergolong dalam indeks pembangunan manusia yang tinggi. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan angka indeks pembangunan manusia yang kurang dari 70% sehingga membuat indonesia

tergolong dalam indeks pembangunan yang sedang. Angka indeks gini Tahun 2016 ini juga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia semakin baik.

**Tabel 1.4**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia (%)**

Tahun	TPT
2012	6,13
2013	6,17
2014	5,94
2015	6,18
2016	5,61

(Sumber : Bappenas)

Dalam tabel 1.4 yaitu Persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2012-2016. Angka tingkat pengangguran terbuka terus mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan selama tahun 2012-2016. Angka tingkat pengangguran terbuka dihasilkan melalui jumlah penduduk yang menganggur kemudian dibagi dengan jumlah angkatan kerja dan dikali dengan seratus persen. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2016 sebesar 5,61%. Angka ini lebih rendah jika di bandingkan Provinsi Banten yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di atas rata-rata Nasional pada tahun 2016 yaitu sebesar 8,92%. Selain itu Provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terendah dari rata-rata Nasional tahun 2016 adalah Provinsi Bali yaitu sebesar 1,89%.

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup tinggi. Adanya jumlah penduduk yang



tinggi di suatu negara tidak selalu membuat pembangunan ekonomi berhasil namun juga bisa menjadikan permasalahan dalam suatu pembangunan. Hal ini terjadi ketika tingginya jumlah penduduk namun tidak diikuti dengan jumlah lapangan pekerjaan yang banyak (Sulistiawati, 2012). Apabila hal ini terjadi maka akan menyebabkan tidak semua penduduk usia produktif dapat menyerap lapangan pekerjaan karena terdapat keterbatasan dalam ketersediaan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya membuat persaingan dalam mencari pekerjaan semakin sulit. Hal ini kemudian membuat para pekerja kelas rendah/buruh lebih memilih untuk dibayar lebih rendah dari pada harus menganggur yang kemudian membuat semakin melebarnya ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat.

**Tabel 1.5**

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia (%)**

Tahun	TPAK
2012	67,76
2013	66,77
2014	66,60
2015	65,76
2016	66,34

(Sumber Bappenas)

Dalam tabel 1.5 menunjukkan bahwa persentase tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia setiap tahunnya berfluktuasi. tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia tertinggi berada pada tahun 2012 kemudian pada tahun 2013-2015 angka partisipasi angkatan kerja di Indonesia terus mengalami penurunan mencapai 65,76% dan hingga pada tahun 2016 tingkat partisipasi

angkatan kerja naik kembali menjadi 66,34%. Semakin tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja maka perlu adanya penambahan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan agar dapat menyerap jumlah pekerja yang banyak. Menurut (Rose & Sovita, 2016) adanya tingkat pengangguran di suatu wilayah mengindikasikan bagaimana kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Tingginya pengangguran di suatu wilayah mengindikasikan adanya faktor produksi yang masih tidak digunakan secara keseluruhan untuk menunjang pembangunan. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB Perkapita dalam suatu wilayah akan menyebabkan kesejahteraan antar masyarakat semakin rendah dan juga terhambatnya pembangunan di suatu wilayah yang kemudian akan menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin tinggi

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik serta menganggap pentingnya untuk dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2008-2016.

## 1.2 Batasan masalah

Tujuan adanya pembatasan masalah yaitu agar penelitian yang dilakukan tidak meluas yang menyebabkan kesulitan dalam pemahaman yang sudah disesuaikan dengan tujuan adanya proposal ini. Sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang nantinya akan dibahas dalam skripsi. Pemasalahan yang dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu faktor-faktor yang

mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa dengan variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan (Indeks gini) dan beberapa variabel independen yang digunakan yaitu PDRB Perkapita ADHK 2010, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Penelitian ini menggunakan alat analisis linier berganda serta 42 observasi terhitung mulai tahun 2010 sampai 2016.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Ketimpangan pendapatan masih saja terjadi di berbagai negara di dunia. Di Indonesia yang merupakan negara berkembang terjadinya ketimpangan pendapatan ini masih saja menjadi penyakit yang membelenggu di berbagai wilayah. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dilakukan peneliti ialah:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

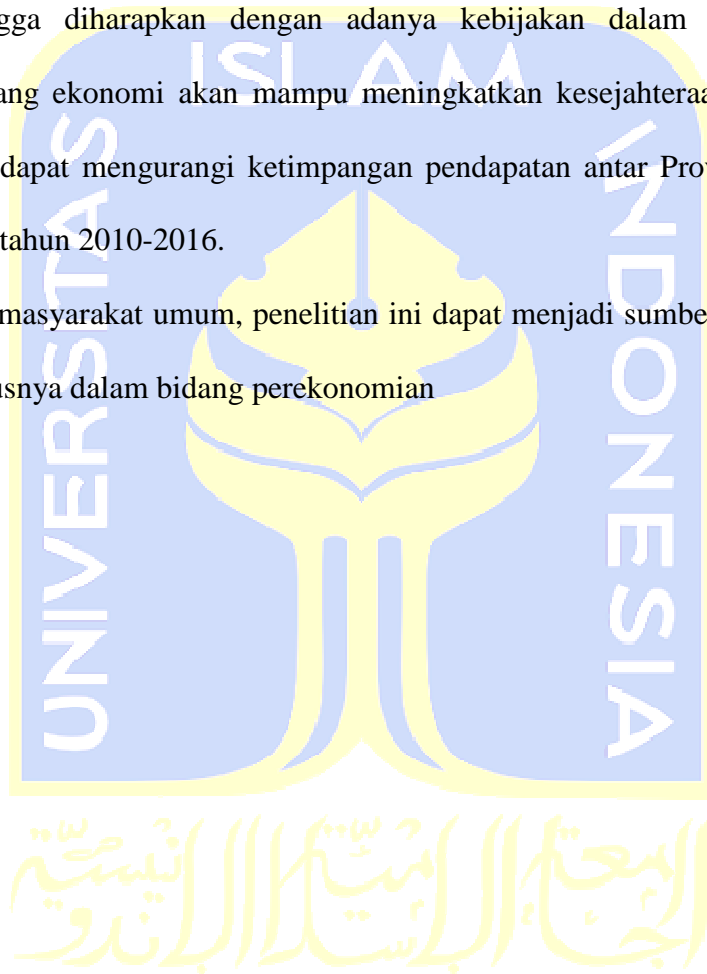
1. Mengetahui serta menganalisa bagaimana pengaruh PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
2. Mengetahui serta menganalisa bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
3. Mengetahui serta menganalisa bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
4. Mengetahui serta menganalisa bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk penulis, dengan adanya penelitian ini dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana serta dapat menambah pengetahuan terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan seperti PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja

(TPAK), serta untuk menambah pengetahuan maupun wawasan penulis tentang ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.

2. Bagi instansi pemerintahan, dengan adanya penelitian ini dapat mengambil manfaat sebagai referensi dalam mengambil kebijakan yang tepat. sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan dalam pembangunan dibidang ekonomi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan khususnya dalam bidang perekonomian



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Dalam bab ini yaitu mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh menulis yaitu analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Dengan adanya penelitian terdahulu yaitu sebagai referensi dan sebagai pertimbangan dalam hasil analisis.

Hutabarat (2015) melakukan penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan waktu tahunan yaitu tahun 2001-2013 menggunakan IBM SPSS V.22.0 yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh variabel laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, IPM, jumlah penduduk miskin, kontribusi sektor industri serta kontribusi sektor pertanian terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu kesenjangan pendapatan dengan beberapa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, IPM, jumlah penduduk miskin, kontribusi sektor industri serta kontribusi sektor pertanian. Hasil yang diperoleh yaitu pengaruh variabel tingkat pendidikan (SMP), kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor industri terhadap kesenjangan pendapatan adalah negatif, yang menandakan bahwa tenaga kerja yang bekerja dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, semakin tinggi kontribusi sektor pertanian dan industri akan

membuat kesenjangan pendapatan mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan akhir (SMP), kontribusi sektor pertanian dan industri serta jumlah penduduk miskin mampu menjelaskan adanya faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara yaitu melalui hasil R-Squared = 98,3% dengan nilai F Statistik = 57,939 dengan tingkat signifikan 0.000. namun secara uji T, hanya beberapa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap adanya kesenjangan pendapatan yaitu tingkat pendidikan akhir (SMP) dan kontribusi sektor pertanian dan laju pertumbuhan ekonomi.

Rosa & Sovita (2016) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan jumlah data time series 7 tahun yaitu tahun 2009-2015 dan data cross section 6 Provinsi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDB, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat desentralisasi fiskal terhadap ketidakmerataan pendapatan secara parsial dan simultan dengan signifikansi 5% dengan model yang tepat digunakan adalah fixed effect model. Hasil yang diperoleh bahwa pengaruh PDB, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan yaitu positif dan signifikan. Variabel independen dalam penelitian ini mampu menggambarkan terjadinya ketimpangan pendapatan sebesar 78,59% dan sisanya yaitu 21,41% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen.

Danawati dkk (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis program AMOS. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah serta investasi terhadap kesempatan kerja (TPAK). Investasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tenaga kerja (TPAK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan secara tidak langsung memiliki pengaruh positif melalui variabel tenaga kerja (TPAK) serta pertumbuhan ekonomi. Serta hubungan variabel pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja (TPAK) dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah positif dan signifikan.

Hartini (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB perkapita, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan data time series berupa 5 tahun serta data cross section berupa 5 Kabupaten/Kota di DIY dengan menggunakan regresi fixed effect model. Tujuannya yaitu mengetahui pengaruh variabel PDRB Perkapita, Investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi DIY pada periode tahun 2011-2015 dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil yang diperoleh yaitu



pengaruh variabel PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan sedangkan pengaruh investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif dan signifikan.

Arif & Wicaksoni (2017) melakukan penelitian tentang ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur 2011-2015 dengan variabel bebas yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja serta jumlah penduduk. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi data panel dengan menggunakan model regresi paling tepat yaitu random effect untuk melihat bagaimana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa variabel IPM mempunyai hubungan positif dan signifikan. Selain itu hubungan variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan yaitu signifikan.

T & Purbadharmaja (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh IPM, infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung adanya variabel IPM, Infrastruktur, Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan melalui variabel pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan penggunaan data sekunder tahun 2008-2015. Dalam memperoleh data digunakan metode observasi non partisipan dengan menggunakan alat analisis

jalur. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh langsung antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu biaya infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh secara langsung serta signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. IPM serta investasi tidak berpengaruh secara langsung serta signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening yang memiliki pengaruh secara tidak langsung antara IPM dan biaya infrastruktur terhadap adanya ketimpangan pendapatan.



Tabel 2.1

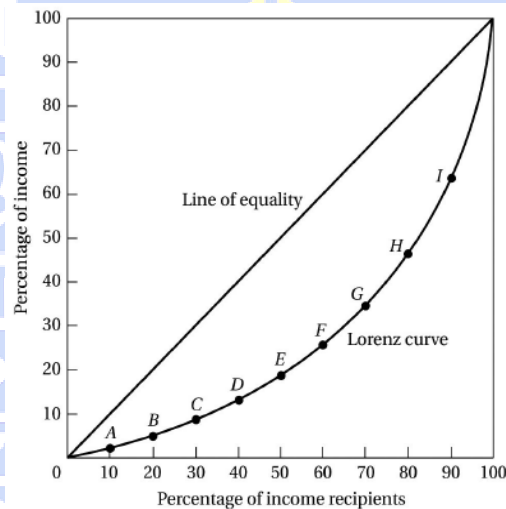
## KAJIAN PUSTAKA

NAMA	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Hutabarat (2015)	Dependen : Ketimpangan Pendapatan. Independen : Laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, TPT, IPM, penduduk miskin, agrishare dan industrishare	Regresi Indeks williamson, Indeks Entropi Theil serta Analisis Regresi Linier Berganda.	Tingkat pendidikan akhir (SMP) dan kontribusi sektor pertanian dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap adanya kesenjangan pendapatan. Adapun variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) , kontribusi sektor industri dan jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. semua variabel memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan kecuali variabel laju pertumbuhan ekonomi.
Rosa & Sovita (2016)	Dependen : Ketimpangan pendapatan Independen : PDB, populasi penduduk, TPT, dan tingkat desentralisasi fiskal.	Analisis Regresi Data Panel.	PDB, populasi penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan. Namun variabel PDB, populasi penduduk dan tingkat pengangguran terbuka hanya menjelaskan terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 78,59% dan sisanya 21,41 di jelaskan oleh variabel di luar variabel independen.
Danawati, dkk (2016)	Dependen : Ketimpangan pendapatan Independen : Pengeluaran pemerintah, investasi terhadap kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi	Analisis jalur dengan program AMOS.	Investasi positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja (TPAK) positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan secara tidak langsung positif melalui variabel kesempatan kerja (TPAK) dan pertumbuhan ekonomi. Serta pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja (TPAK) dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah positif dan signifikan.
Hartini (2017)	Dependen : Ketimpangan pendapatan Independen : PDRB perkapita, investasi, dan IPM.	Analisis Regresi Data Panel.	Hasil yang diperoleh yaitu pengaruh variabel PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan sedangkan pengaruh investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif dan signifikan.
Arif & Wicaksoni (2017)	Dependen : Penduduk Miskin Independen : IPM, pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk.	Analisis Regresi Data Panel.	Model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah <i>model random effect</i> . IPM mempunyai hubungan positif dan signifikan. Selain itu hubungan variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan yaitu signifikan.
T & Purbadharmaja (2017)	Dependen : Ketimpangan pendapatan. Independen : IPM, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.	Analisis jalur (path analysis).	Adanya pengaruh langsung antara IPM dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu biaya infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh secara langsung serta signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. IPM serta investasi tidak berpengaruh secara langsung serta signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening yang memiliki pengaruh secara tidak langsung antara IPM dan biaya infrastruktur terhadap adanya ketimpangan p Pendapatan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 ketimpangan distribusi pendapatan

Kuznet mengungkapkan bahwa pada proses awal pertumbuhan ekonomi di negara miskin cenderung menyebabkan terjadinya kemiskinan yang meningkat dan juga membuat ketimpangan dalam pendapatan semakin tidak merata. Kemudian setelah negara tersebut mengalami kemajuan akan membuat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin menurun (Kuncoro, 2006).



Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi cenderung akan lebih terpusat pada sektor industri modern, lapangan pekerjaan cenderung terbatas tetapi upah yang diterima dan tingkat produktivitas terhitung tinggi. Pada tahap awal ketimpangan pendapatan antara sektor industri modern dengan sektor pertanian mengalami peningkatan dengan cepat namun sebelum kemudian mengalami penyusutan. Ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi pada daerah dengan sektor industri modern dari pada suatu daerah yang menggunakan sektor pertanian yang relatif tetap (Todaro, 2006). Kuznet juga mengungkapkan bahwa

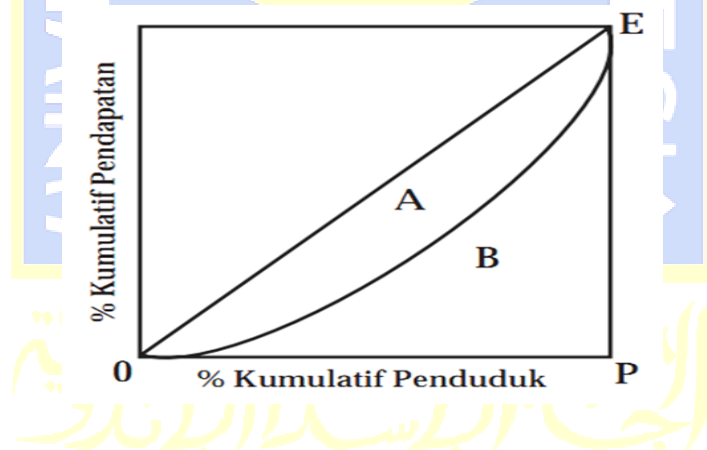
ketimpangan dalam distribusi pendapatan pada tahap awal cenderung semakin meningkat karena adanya perekonomian yang mengalami penurunan yang cukup besar dalam pendistribusian pendapatan, kemudian setelah tahap pembangunan berikutnya ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menurun karena distribusi pendapatan sudah lebih merata. Dalam jangka pendek terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan namun kemudian dalam jangka panjang hubungannya adalah negatif. Permasalahan dalam pembangunan antar daerah ini diakibatkan adanya sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang berbeda di setiap daerah sehingga proses pembangunan di setiap daerah juga mengalami perbedaan yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah (Hutabarat, 2014).

Menurut (Soediyono, 1992) distribusi pendapatan merupakan total hasil yang diterima oleh masyarakat dalam waktu tertentu yang merupakan balas jasa atas adanya faktor-faktor produksi nasional yang tergolong dari sumber daya alam, modal, sumber daya manusia, serta kemampuan berwirausaha. Sehingga dapat di artikan bahwa pendapatan yang di peroleh masyarakat akibat adanya balas jasa terhadap suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Pendapatan ini berasal dari adanya sektor formal maupun non formal. Menurut (Sukirno, 2006) distribusi pendapatan terdapat dua yaitu distribusi pendapatan relatif yang merupakan perbandingan antara total pendapatan yang sudah diterima oleh sekelompok penerima pendapatan tersebut. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak merupakan persentase masyarakat yang mendapatkan pendapatan yang mencapai

pendapatan yang tertentu ataupun kurang dari padanya. Selain itu pemetaan dalam distribusi pendapatan ada tiga kategori yaitu pembagian distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, pembangian distribusi pendapatan antar daerah desa dan kota, serta pembagian distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten/Kota (Dumairy, 1996).

### 2.2.1.1 Kurva Lorenz

Awal mula ditemukannya kurva Lorenz yaitu ada seorang yang berasal dari Amerika yang merupakan ahli dalam bidang statistik yang bernama Conrad Lorenz. Kurva Lorenz ini berbentuk bujur sangkar dengan sisi vertikal merupakan persentase pendapatan yang diterima oleh masyarakat serta dari sisi horizontal merupakan persentase penduduk (Dumairy, 1996).



Sumber: (Dumairy, 1996)

Apabila akan menentukan seberapa besar ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kurva Lorenz yaitu dengan melihat seberapa dekat dan jauhnya garis lengkung terhadap garis diagonal. Garis lengkung yang semakin mendekati garis diagonal maka distribusi pendapatan dimasyarakat semakin merata namun

ketika garis lengkungan semakin menjauh dengan garis diagonal maka distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin memburuk (semakin timpang). Adapaun cara dalam menggambarkan kurva lorenz dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Dengan mengurutkan antara data pengeluaran, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar.
2. Menentukan antara desil pertama sampai dengan desil kesepuluh dalam distribusi data.
3. Menghitung seberapa besar distribusi pendapatan yang terdapat pada masing-masing kelompok desil.
4. Menentukan kumulatif persentase pendapatan yang terdapat pada masing-masing kelompok desil.
5. Menghitung persentase kumulatif distribusi pendapatan pada masing-masing desil.
6. memetakan dalam plot 2 dimensi yaitu seluruh desil berada di sisi horizontal dan persentase kumulatif distribusi pendapatan di sisi vertikal.

Dengan menggunakan kurva lorenz, maka ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat melalui area timpang yang sudah terbentuk dengan adanya garis lengkung dan garis diagonal di dalam kurva. Dengan begitu perubahan besaran angka ketimpangan pada waktu ke waktu maupun perbandingan antar tempat tidak mudah untuk dibedakan. Dan

pengukuran secara kuantitatif dapat menggunakan perhitungan yang ada di dalam indeks gini.

### **2.2.1.2 Indeks gini**

Indeks gini sebagai metode perhitungan yang sering digunakan dalam melihat seberapa besar angka ketimpangan pendapatan yang terjadi (BPS,2013) . perhitungan dengan menggunakan indeks gini didapatkan dengan menghitung luas daerah di antara garis diagonal yang merupakan garis pemerataan sempurna dengan kurva lorenz dan kemudian di bandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar dimana terdapatnya kurva lorenz (Arsyad, 2010) . masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan kemudian diurutkan mulai dari pengeluaran perkapita terendah sampai dengan tertinggi dan kemudian dibentuk golongan-golongan setiap 10% mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Selanjutnya dilakukan perhitungan frekuensi presentase dan kumulatif presentase bagi masyarakat yang memperoleh pendapatan maupun pendapatan yang diterima. Angka kisaran dalam menentukan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Apabila angka indeks gini yang dihasilkan mendekati angka 0 menunjukkan bahwa terjadi pemerataan pendapatan antar masyarakat (pemerataan sempurna) namun apabila angka indeks gini mendekati 1 menandakan bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat semakin timpang (ketimpangan tinggi).



## 2.2.2 Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan

### 2.2.2.1 PDRB Perkapita

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan seluruh nilai tambah yang diperoleh keseluruhan unit usaha dalam suatu daerah ataupun penjumlahan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh keseluruhan unit ekonomi di suatu daerah. adapun PDRB perkapita didapat dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Menurut (Tarigan, 2004) ada tiga metode pendekatan yang digunakan dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu :

1. Pendekatan produksi

Produk Domestik Regional Bruto ialah perhitungan nilai tambah barang serta jasa yang dihasilkan dalam suatu kegiatan perekonomian di suatu daerah yang kemudian dikurangi dengan total biaya bruto dalam setiap kegiatan subsektor. Nilai tambah yang dimaksudkan adalah selisih nilai suatu produksi dan nilai suatu biaya yang terdiri dari bahan baku yang diperoleh dari luar yang digunakan dalam suatu proses produksi.

2. Pendekatan pendapatan

Nilai tambah dalam suatu kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan seluruh faktor produksi yang diperoleh berupa upah, gaji, tambahan usaha, penyusutan, serta pajak secara tidak langsung neto kepada sektor pemerintahan serta usaha yang memiliki karakteristik tidak mencari keuntungan, serta tidak memperhitungkan

surplus usaha berupa bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah serta keuntungan. metode pendekatan pendapatan ini umumnya digunakan oleh sektor jasa namun tidak di bayarkan sesuai dengan harga pasaran, contohnya seperti sektor pemerintahan karena tidak ada kelengkapan data serta tidak terdapatnya metode yang tepat yang digunakan untuk mengukur nilai produksi dan biaya dari dalam berbagai kegiatan di sektor jasa dan yang lebih utamanya tidak mengutip biaya.

### 3. Pendekatan pengeluaran

Dalam metode pendekatan pengeluaran ini yaitu mentotalkan seluruh nilai penggunaan akhir dari adanya produksi barang serta jasa dalam negeri. Keseluruhan produksi barang serta jasa yang dihasilkan kemudian di gunakan sebagai konsumsi rumah tangga, konsumsi oleh institusi swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, investasi serta perubahan stok serta ekspor neto.

Menurut (Sukirno, 2005) dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto dibentuk menjadi dua macam yaitu :

#### 1. Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

Pengertian PDRB atas dasar harga konstan menurut BPS adalah keseluruhan nilai tambah produksi barang serta jasa yang dihiitung dengan harga suatu tahun tertentu yang digunakan sebaga tahun dasar yang mana dalam penelitian ini menggunakan tahun dasar 2010. Dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian PDRB atas dasar harga berlaku menurut BPS ialah nilai tambah yang diperoleh dari sektor ekonomi secara keseluruhan yang mana nilai tambah yang diperoleh dihitung dengan harga pada setiap tahunnya yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar struktur perekonomian dan peranan dalam sektor ekonomi.

### **2.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah cara yang digunakan untuk mengukur pencapaian dalam suatu pembangunan manusia yang ada di suatu daerah. Namun keberhasilan dalam IPM tidak hanya melihat dari tingginya angka IPM yang dihasilkan namun juga dari percepatan dalam peningkatan IPM. Pengukuran IPM yaitu dengan menggunakan tiga sisi yaitu pendapatan, pendidikan serta perekonomian yang semakin membaik. Suatu negara harus menjunjung tinggi pentingnya pendidikan serta kesehatan, karena kedua komponen ini adalah suatu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan potensi yang dimiliki suatu negara yang kemudian membuat kualitas manusia di negara tersebut semakin meningkat. Apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius, maka harapan suatu negara untuk memiliki kehidupan yang sehat, umur yang panjang, memiliki pengetahuan luas serta mendapatkan kehidupan yang layak itu akan tercapai (Badan Pusat Statistik, 2014).

Indeks pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 yaitu dengan menggunakan beberapa indikator dalam perhitungan indeks pembangunan manusia yaitu:

1. Angka Harapan Hidup saat lahir
2. Angka Melek Huruf
3. Angka Partisipasi Kasar
4. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita

Selain itu banyak di berbagai negara dan juga salah satunya negara Indonesia yang menggunakan IPM dalam mengukur perkembangan dalam kemajuan masyarakatnya yang di publikasikan pertama kali oleh UNDP. Adapun indikator perhitungan IPM di Indonesia adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Kemudian pada tahun 2010 UNDP telah memperkenalkan kembali adanya perhitungan IPM metode baru dengan beberapa indikator yang digunakan adalah angka melek huruf serta angka partisipasi kasar diubah menjadi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. PDB per kapita diubah menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita serta perhitungan rata-rata aritmatik diubah rata-rata geometrik. Namun Indonesia baru saja menggunakan IPM metode baru pada tahun 2014 dengan indikator IPM sesuai dengan UNDP namun yang berbeda hanya PNB Perkapita yang kemudian di Proksi menjadi pengeluaran perkapita. Dengan menggunakan IPM metode baru ini membuat tingkatan IPM menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM metode lama. Penggunaan IPM metode baru dipandang lebih mendapatkan gambaran adanya pembangunan manusia secara menyeluruh. Adanya perubahan

dari IPM metode lama menjadi IPM metode baru karena penggunaan indikator angka melek huruf (AMH) tidak tepat jika digunakan dalam mengukur pendidikan secara menyeluruh dikarenakan tidak mampu menjelaskan kualitas pendidikan. Selain itu indikator PDB perkapita adalah proksi dari distribusi pendapatan masyarakat. Adanya indikator PDB perkapita dibentuk dari adanya faktor produksi secara keseluruhan dan juga investasi asing. Namun tidak seluruh penduduk lokal menikmati pendapatan dari hasil faktor produksi sehingga PDB perkapita dianggap belum mampu untuk menjelaskan pendapatan masyarakat maupun tingkat kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2015).

Adapun kisaran angka IPM yaitu berkisar antara 0 sampai 100. Ketika nilai IPM semakin mendekati 0 menandakan bahwa pembangunan manusia semakin memburuk namun sebaliknya ketika nilai IPM mendekati 100 menandakan bahwa pembangunan manusia semakin membaik. Adapun pembagian nilai IPM dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

IPM < 50 tergolong rendah

IPM antara 50 > 80 tergolong sedang

IPM > 80 tergolong tinggi.

Menurut (Hutabarat, 2014) pembangunan ekonomi suatu daerah mengalami keberhasilan apabila pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang mengalami peningkatan. Indeks pembangunan manusia akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat, apabila indeks pembangunan manusianya kecil membuat produktivitas masyarakat juga kecil dan

kemudian akan membuat pendapatan yang dihasilkan juga kecil. Namun ketika indeks pembangunan manusianya tinggi membuat produktivitas masyarakat juga akan tinggi dan kemudian akan mampu membuat pendapatan yang dihasilkan juga tinggi.

### 2.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut (Sukirno, 2000) pengangguran dibagi menjadi empat golongan sesuai dengan cirinya, yaitu:

#### 1. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang terus mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan jumlah lapangan pekerjaan yang meningkat pula sehingga menyebabkan mereka menganggur dalam waktu yang cukup lama. Selain itu terjadinya pengangguran terbuka tidak hanya disebabkan karena sedikitnya lapangan pekerjaan namun juga karena kegiatan dalam suatu perekonomian mengalami penurunan yaitu seperti adanya perkembangan teknologi yang digunakan semakin canggih sehingga membuat minat terhadap tenaga kerja semakin menurun maupun karena terjadinya perkembangan industri yang mengalami penurunan yang membuat banyak tenaga kerja yang di berhentikan.

## 2. pengangguran tersembunyi

pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang bekerja namun tidak optimal. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran ini seperti banyaknya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan melebihi kapasitas perusahaan. Banyaknya jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan tersebut membuat para pekerja semakin tidak efisien dalam menjalankan pekerjaannya. Kelebihan tenaga kerja inilah yang termasuk dalam pengangguran tersembunyi.

## 3. pengangguran setengah menganggur

pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang belum mampu bekerja maksimal dikarenakan belum adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran setengah menganggur ini yaitu para pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Mereka bekerja kemungkinan adalah satu sampai dua hari dalam seminggu maupun satu sampai empat jam dalam sehari sehingga mereka yang memiliki pekerjaan ini dikelompokkan kedalam pengangguran setengah menganggur.

## 4. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat oleh musim tertentu. biasanya pengangguran musiman ini terjadi pada para pekerja yang bekerja dalam sektor pertanian yang mana para petani tidak terlalu aktif bekerja pada saat sesudah masa menanam dan sebelum masa panen. Jika dalam waktu tersebut para petani tidak melakukan pekerjaan lainnya maka mereka terpaksa harus menganggur.

Selain itu terdapat tiga jenis pengangguran yang sudah digolongkan sesuai dengan penyebabnya, yaitu :

1. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang diakibatkan dari mereka yang memiliki pekerjaan namun memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dan kemudian mencari pekerjaan yang sesuai apa yang diinginkan serta pekerjaan yang lebih baik. Contohnya adalah banyaknya lulusan perguruan tinggi yang ingin memperoleh pekerjaan dengan upah yang tinggi. Namun karena belum memperoleh pekerjaan sesuai keinginan mereka lebih memilih menganggur dari pada bekerja yang tidak sesuai dengan keinginan.

2. Pengangguran struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan karena terjadinya perubahan struktur perekonomian contohnya yaitu daerah yang awalnya menggunakan sektor pertanian yang menarik jumlah tenaga kerja yang banyak untuk menghasilkan output, namun kemudian struktur ekonomi berubah menjadi sektor industri yang lebih banyak menggunakan teknologi yang canggih serta dapat menghasilkan output yang lebih banyak dari pada menggunakan tenaga kerja buruh/karyawan.

3. Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang diakibatkan adanya lebihnya jumlah pengangguran alamiah maupun berlaku yang



disebabkan karena permintaan agregat yang mengalami penurunan. Contohnya yaitu ketika suatu perusahaan sedang mengalami kemajuan maka permintaan terhadap tenaga kerja semakin banyak namun ketika suatu perusahaan mengalami kemunduran maka para pekerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut akan di berhentikan (PHK).

Tingkat pengangguran terbuka merupakan angka yang menandakan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja. Adapun konsep pengangguran terbuka ialah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, baik yang baru pertama kali akan bekerja maupun yang sebelumnya sedang bekerja. Adapun sedang bekerja disini dikelompokkan kedalam setengah menganggur yaitu mereka yang para pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh maupun pekerjaan sampingan serta mereka para pekerja yang bekerja dengan jam kerja yang sedikit (35 jam dalam seminggu) . tetapi mereka yang masih menerima pekerjaan dan mereka yang sedang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan tersebut. Adapun pekerja yang tergolong dalam setengah menganggur parah ialah mereka yang tergolong dalam pekerja setengah menganggur dengan jumlah jam kerja dibawah 25 jam dalam seminggu.

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi sangat memungkinkan terjadinya pengangguran. Menurut (Sjafrizal, 2012) dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah perlu memperhatikan tingkat penganggurannya karena pengangguran adalah salah satu faktor utama dalam kesejahteraan masyarakat. Indonesia yang

merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi maka perlu adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tinggi pula karena ketika jumlah lapangan pekerjaan banyak maka akan mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi pula. Penyediaan lapangan pekerjaan juga merupakan tujuan utama adanya pembangunan di suatu wilayah. Masyarakat di suatu wilayah yang memiliki kesejahteraan yang rendah dapat dilihat melalui banyaknya pengangguran di wilayah tersebut. Sehingga perlu adanya upaya dalam menekan pengangguran agar kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tersebut dapat meningkat.

#### **2.2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Menurut (Sukirno, 2004) definisi adanya angkatan kerja yaitu jumlah angkatan kerja yang ada di suatu perekonomian dalam waktu tertentu yang digolongkan menjadi kelompok yang sedang bekerja, kelompok yang sedang menganggur namun sedang mencari kerja. Yang tergolong dalam bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih menempuh jenjang pendidikan, mereka yang mengurus keadaan rumah tangga, serta lainnya maupun yang menerima pendapatan. adanya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu hasil yang didapatkan dari membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15-64 tahun) yang dianggap mampu menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dengan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja maka akan dapat mengetahui sebenarnya seberapa banyak penduduk usia kerja yang aktif bekerja maupun tidak. Dalam tingkat partisipasi angkatan kerja ini membandingkan angkatan kerja dengan usia kerja sehingga ketika jumlah penduduk usia kerja yang

semakin meningkat maka akan berdampak pada tingginya jumlah angkatan kerja. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = (\text{Angkatan Kerja} : \text{Penduduk Usia Kerja}) \times 100\%$$

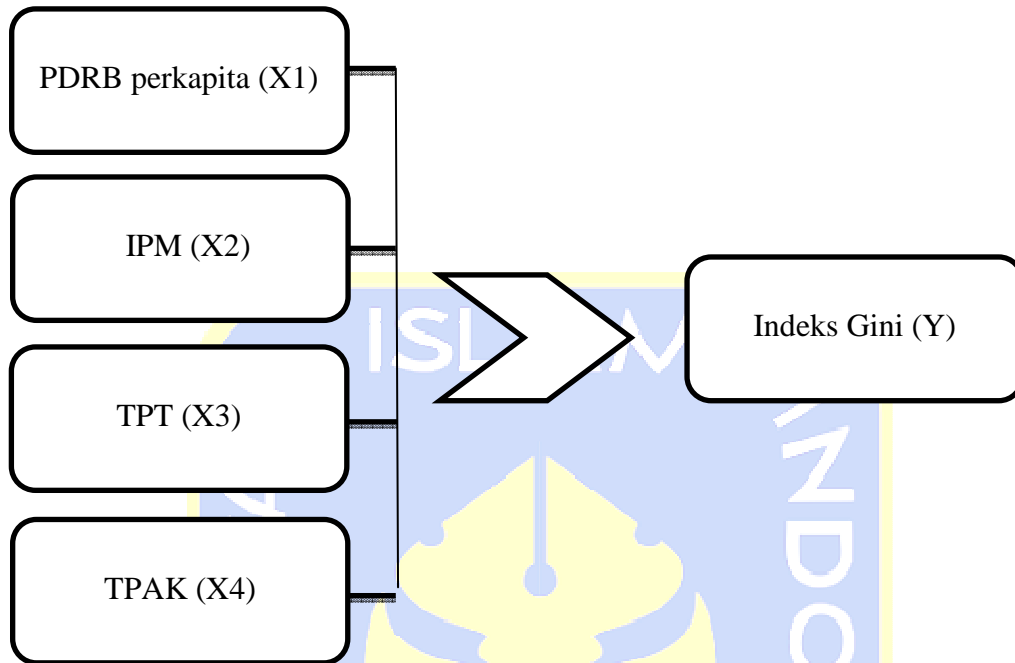
Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang semakin banyak. Selain itu rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja ini bukan disebabkan karena tingginya angkatan kerja tetapi disebabkan oleh semakin tingginya jumlah penduduk bukan angkatan kerja seperti mereka yang menempuh jenjang pendidikan serta mengurus rumah tangga.

Adanya tingkat partisipasi angkatan kerja ini berpengaruh kepada hasil output yang dihasilkan dalam suatu kegiatan ekonomi. Dengan begitu output akan semakin tinggi ketika jumlah penduduk produktif juga tinggi. Output yang dihasilkan nantinya akan berpengaruh kepada besarnya PDB dan PDRB Perkapita. Apabila tingkat partisipasi angkatan kerja semakin tinggi maka akan membuat PDRB Perkapita juga akan tinggi dan konsumsi yang akan berpengaruh kepada besarnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang dapat membuat tingkat partisipasi angkatan kerja semakin meningkat yaitu pertama, penduduk bukan angkatan kerja (penduduk yang sedang menempuh pendidikan serta mengurus rumah tangga) yaitu ketika jumlah bukan angkatan kerja semakin meningkat menandakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan. Kedua, usia ternyata yang memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu masyarakat yang memiliki umur yang muda lebih memiliki beban yang tinggi berupa mencari pendapatan untuk

memenuhi kebutuhannya seperti pendidikan maupun keluarga. Ketiga, gaji/upah yaitu ketika upah yang diperoleh oleh masyarakat besar maka akan menarik masyarakat pada umumnya untuk ikut bekerja sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat. Dan keempat, pendidikan yang memiliki korelasi terhadap tingkat pengangguran terbuka, yaitu ketika pendidikan yang ditempuh seseorang semakin tinggi maka semakin tinggi pula waktu dalam bekerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami peningkatan, maka output regional yang dihasilkan juga meningkat namun dengan menggunakan asumsi bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat juga diikuti dengan produktivitas yang meningkat pula. Adapun jika secara teori daya tarik dari adanya tenaga kerja adalah berupa upah atau imbalan jasa yang diterima pekerja. Upah yang tinggi akan membuat produktivitas tenaga kerja akan cenderung meningkat dalam proses produksi. Apabila hal ini terjadi maka akan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Selain itu perlu diketahui yang juga merupakan indikator penting dalam suatu proses produksi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dalam setiap daerah. dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan akan mampu membuat pendapatan masyarakat semakin meningkat. Bagi para penyedia lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja maka akan dapat mengatasi permasalahan pengangguran yang ada. Tetapi ketika jumlah tenaga kerja yang terus meningkat namun tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang banyak juga maka akan mampu membuat pengangguran semakin meningkat dan kemudian akan memperlambat jalannya pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Darzal, 2016).

## 2.2 Kerangka Pemikiran



## 2.2 Hipotesis Penelitian

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga PDRB Perkapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
2. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
3. Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.
4. Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* berupa urutan waktu yang digunakan yaitu tahun 2010-2016 dan data *cross section* yaitu berupa urutan lintang yaitu berupa 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan total jumlah observasi yaitu 42. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel dependen yaitu indeks gini dipengaruhi oleh beberapa variabel independen yaitu berupa PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dan sempel. Selain itu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti mengutip dari buku-buku dan bacaan ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan yaitu berupa ketimpangan pendapatan atau Indeks gini (Y) serta beberapa variabel independen yaitu PDRB Perkapita (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) dan Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja (X4).

### 3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) merupakan variabel terikat yang dapat dipengaruhi variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan atau indeks gini. Pengertian ketimpangan pendapatan itu sendiri dapat diartikan sebagai ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan sehingga menyebabkan terdapatnya beberapa daerah yang tergolong daerah maju dan beberapa daerah yang tergolong dalam daerah terbelakang yang disebabkan karena perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Indeks gini dalam penelitian ini dinyatakan dalam persen.

### 3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen (X) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari :

1. PDRB Perkapita (X1)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kemampuan daerah dalam menciptakan output (nilai tambah) pada kurun waktu tertentu atas dasar faktor biaya. cara menghitung PDRB Perkapita yaitu antara PDRB Harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Dalam penelitian ini menggunakan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 2010 yang berada antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2008-2016 dalam satuan ribuan rupiah.

## 2. Indeks pembangunan manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu ukuran pencapaian pembangunan manusia dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dengan menggunakan penilaian beberapa komponen yaitu kesehatan, pendapatan serta pendidikan. Indeks pembangunan manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks pembangunan manusia antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2016 dalam satuan persen.

## 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau penduduk yang tidak bekerja karena tidak memperoleh pekerjaan ataupun penduduk yang mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja. Dalam mengukur TPT yaitu antara jumlah penduduk yang pengangguran kemudian dibagi dengan jumlah angkatan kerja dan dikalikan dengan seratus persen. dalam penelitian ini menggunakan tingkat pengangguran terbuka yang berada antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2016 dalam satuan persen.

## 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk usia produktif ataupun usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam suatu daerah. dalam mengukur TPAK yaitu persentase jumlah angkatan kerja (pekerja dan mengangur) terhadap jumlah penduduk usia kerja. dalam penelitian ini menggunakan tingkat partisipasi angkatan kerja



yang berada antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2016 dalam satuan persen.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diperoleh yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan yaitu tahun 2010-2016 dengan 6 Provinsi di Pulau Jawa.

### 3.4 Metode Analisis

Dengan menggunakan analisis data kuantitatif dalam mengolah data yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel independen (variabel bebas) dapat mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Sehingga perlu dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data panel yaitu sebagai alat dalam pengolahan data dengan menggunakan *Eviews 8*. Metode analisis panel data merupakan kombinasi antara deret waktu (time series) dengan analisis deret hitung (cross section).

$$IG = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{IPM} + \beta_3 \text{TPT} + \beta_4 \text{TPAK} + \mu$$

Dimana:

IG = Jumlah Indeks Gini (Persen)

PDRB = Jumlah PDRB Perkapita ADHK 2010 (ribu rupiah)

IPM = Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (persen)

- TPT = Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka ( persen)
- TPAK = Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
- $B_0$  = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien regresi berganda
- $\mu$  = Variabel pengganggu

(Widarjono, 2007) mengungkapkan bahwa dengan menggunakan data panel kita akan memperoleh keuntungan yaitu dengan lebih banyak tersedianya data yang nantinya akan memperoleh *degree of freedom* yang lebih besar yang didalamnya merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* yang mampu untuk mengatasi adanya permasalahan yang akan terjadi ketika terdapatnya masalah penghilang variabel.

### 3.5 Estimasi Model Regresi Data Panel

(Widarjono, 2007) mengatakan bahwa dalam mengestimasi model regresi dengan data panel terdapat beberapa cara yaitu *pooling least square* (*Common Effect*), pendekatan dengan efek tetap (*Fixed Effect*) dan pendekatan dengan efek random (*Random Effect*).

#### 3.5.1 Pooled Least Square (*Common Effect*)

Dalam pengestimasi data panel menggunakan *common effect* merupakan cara yang sederhana karena hanya mengkombinasikan antara data *time series* dan data *cross section* dengan tanpa melihat perbedaan waktu serta individu sehingga bisa menggunakan metode OLS dalam metode data panel.

Penggunaan common effect ini tidak melihat dari dimensi antar individu maupun antar waktu sehingga dapat diasumsikan bahwa model common effect hanya melihat perilaku data antar Provinsi pada berbagai waktu itu sama (Widarjono, 2013). Berikut ini adalah Model *common effect* ialah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

### 3.5.2 Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Model fixed effect berbeda dengan model common effect. Karena metode fixed effect mengasumsikan bahwa terdapat efek yang memiliki perbedaan antar individu sehingga ketika menggunakan metode fixed effect ini tidak diketahui parameternya yang kemudian akan dilakukan pengestimasi menggunakan teknik variabel dummy dan kemudian variabel dummy ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk mengestimasi data panel yang dimiliki oleh peneliti yaitu dengan model estimasi *Least Squares Dummy Variables (LSDV)* (Widarjono, 2013). Berikut adalah model fixed effect dengan menggunakan teknik variabel dummy yaitu:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{1i} + \beta_6 D_{2i} + \beta_7 D_{3i} + \beta_8 D_{4i} + \beta_9 D_{5i} + e_{it}$$

### 3.5.3 Pendekatan Efek Random (*Random Effect*)

Model pengestimasi data panel menggunakan random effect yaitu memiliki variabel yang dinamakan oleh variabel gangguan. Dimana variabel gangguan ini mungkin saling berhubungan baik antar waktu dan antar individu. Berbeda jika menggunakan fixed effect. Dimana dalam variabel dummy hanya untuk mewakili ketidaktahuan terhadap model yang sebenarnya yang kemudian

akan membawa masalah pada berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang dapat menyebabkan berkurangnya efisiensi parameter. Sehingga permasalahan ini kemudian dapat diatasi dengan menggunakan model random effect yang dapat diatasi menggunakan variabel gangguan (error terms) (Widarjono, 2013). Berikut adalah model *random effect* dalam pengestimasi data panel, yaitu:

$$\ln Y_{it} = (\beta_0 + \mu_i) + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + e_{it}$$

### 3.6 Penentuan Model Estimasi

Dalam melakukan pemilihan model yang nantinya akan digunakan dalam suatu penelitian, maka perlu untuk dilakukan pertimbangan statistik yaitu dengan tujuan untuk memilih manakah model yang tepat untuk digunakan. Sehingga perlu adanya metode pengujian yang dapat dilakukan, seperti:

#### 3.6.1 Chow Test (Uji Chow)

Untuk menentukan model manakah yang paling tepat digunakan antara model common effect dan fixed effect, maka perlu dilakukan uji chow. Dimana uji chow dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat diantara kedua model tersebut dengan hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah:

$H_0$  : gagal menolak model *common effect* atau pooled OLS ketika nilai probabilitas yang dihasilkan adalah tidak signifikan terhadap  $\alpha$  sebesar 1%.

H1 : gagal menolak *fixed effect* ketika nilai probabilitas yang dihasilkan adalah signifikan terhadap  $\alpha$  1%.

Dalam model uji chow ini dengan membandingkan F-statistik dan F-tabel sebagai dasar dilakukannya penolakan dalam hipotesis ini. Apabila F hitung lebih besar dari pada F tabel ( F hitung < F tabel ) maka H0 ditolak dan gagal untuk menolak H1. Sehingga model yang paling tepat digunakan adalah fixed effect. Sedangkan apabila F hitung lebih kecil dari pada F tabel (F hitung > F tabel) maka H1 ditolak dan gagal untuk menolak H0. Sehingga model yang paling tepat digunakan dalam model common effect. Berikut ini persamaan uji chow :

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / m}{(RSS_2) / (n-k)}$$

Dengan  $RSS_1$  dan  $RSS_2$  adalah *residual sum of square* teknik tanpa variabel dummy dan teknik *fixed effect* dengan variabel dummy.

### 3.6.2 Uji Hausman

Dalam memilih model manakah yang paling tepat digunakan antar fixed effect dan common effect, maka uji yang perlu dilakukan yaitu dengan menggunakan uji hausman dengan hipotesis nya sebagai berikut:

H0 : Gagal menolak model *random effect*, apabila nilai chi-square yang dihasilkan dalam uji hausman tidak signifikan pada  $\alpha$  1%.

H1 : Gagal menolak model *fixed effect*, apabila nilai chi-squarenya yang dihasilkan dalam uji hausman signifikan pada  $\alpha$  1%.

Pengujian statistik dalam uji hausman ini mengikuti distribusi statistik yaitu Chi Square dengan degree off freedom sebanyak K, dimana K merupakan variabel independen. Model fixed effect paling tepat digunakan ketika gagal menolak H1 dan menolak HO, dimana statistik hausman lebih besar jika dibandingkan dengan nilai kritisnya. Sedangkan model random effect paling tepat digunakan ketika gagal menolak HO dan menolak H1, dimana statistik hausman lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai kritisnya (Widarjono, 2013). Berikut ini persamaan dari uji hausman:

$$\text{Var}[\hat{\beta} - \hat{\beta}_{\text{GLS}}] = \text{Var}[\hat{\beta}] + \text{Var}[\hat{\beta}_{\text{GLS}}] - \text{Cov}[\hat{\beta}, \hat{\beta}_{\text{GLS}}] - \text{Cov}[\hat{\beta}, \hat{\beta}_{\text{GLS}}]'$$

### 3.7 Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji koefisien determinasi (Uji  $R^2$ ), uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F), serta uji koefisien regresi parsial (Uji t).

#### 3.7.1 Uji Koefisien Determinan (Uji $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dalam suatu model untuk menerangkan variasi variabe terikat. Nilai ( $R^2$ ) berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai ( $R^2$ ) mendekati angka 0 menandakan bahwa kemampun dalam suatu variabel dalam menjelaskan variabel terikat itu sangat terbatas ataupun kecil. Sedangkan apabila nilai ( $R^2$ ) mendekati angka 1 menandakan bahwa kemampuan dalam suatu variabel dalam menjelaskan variabel

terikat itu tidak terbatas yaitu variabel bebas dengan memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel terikat (Ghozali, 2002).

### 3.7.2 Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Pengujian menggunakan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dalam mempengaruhi suatu variabel terikat. Dimana ketika nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F kritis (  $F_{hitung} < F_{kritis}$  ) maka menandakan bahwa  $H_0$  ditolak, serta semua variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Widarjono, 2013). Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$H_1$  : minimal terdapat satu koefisien regresi yang mempunyai nilai tidak sama dengan nol

Ketika hasil nilai prob-f statistic lebih besar dengan  $\alpha 1\%$  , menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. namun ketika nilai prob-f statistic lebih kecil dari  $\alpha 1\%$  , maka artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

### 3.7.3 Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Koefisien regresi secara parsial atau biasa disebut dengan uji t yaitu menunjukkan seberapa besarnya pengaruh yang diakibatkan oleh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, yang mana variabel bebas lainnya dianggap

konstan. Adapun hipotesis dalam pengujian menggunakan uji t yaitu sebagai berikut:

a) PDRB perkapita

$H_0 : \beta_1 = 0$  artinya variabel PDRB perkapita tidak memiliki pengaruh terhadap variabel indeks gini.

$H_1 < \beta_1 = 0$  artinya variabel PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif terhadap variabel indeks gini.

b) Indeks pembangunan manusia

$H_0 : \beta_2 = 0$  artinya variabel Indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap variabel indeks gini.

$H_1 < \beta_2 = 0$  artinya variabel Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap variabel indeks gini.

c) Tingkat pengangguran terbuka

$H_0 : \beta_3 = 0$  artinya variabel Tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap variabel indeks gini.

$H_1 > \beta_3 = 0$  artinya variabel Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap variabel indeks gini.

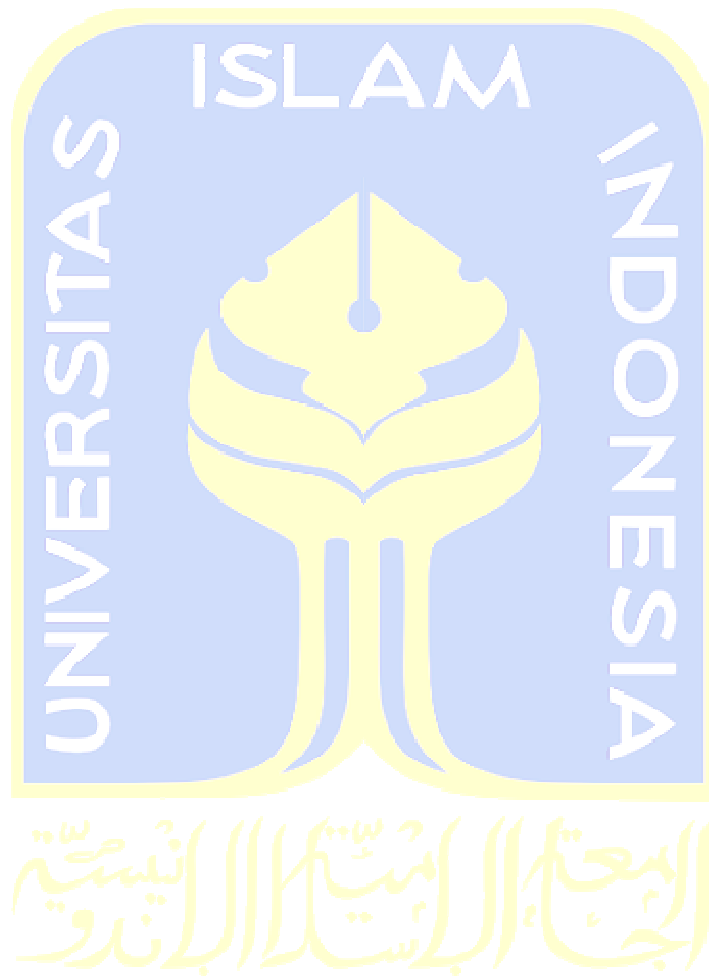
d) Tingkat partisipasi angkatan kerja

$H_0 : \beta_4 = 0$  artinya variabel Tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap variabel indeks gini.

$H_1 < \beta_4 = 0$  artinya variabel Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap variabel indeks gini.



Dalam pengujian menggunakan uji ini, asumsinya apabila menerima  $H_0$  dan menolak adanya  $H_1$  yaitu ketika probabilitas nilai  $t$  hitung lebih kecil dari  $\alpha$  1% (nilai  $t_{hitung} > 0.01$ ). namun apabila menerima  $H_1$  dan menolah  $H_0$  yaitu ketika probabilitas  $t$  hitung lebih besar dari  $\alpha$  1% (nilai  $t_{hitung} > 0.01$ ) dan selain itu signifikansi  $\alpha$  pada uji  $t$  ini menggunakan angka sebesar 0.01 (Widarjono, 2013).



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas maupun bappeda, buku-buku, junal, publikasi serta artikel pendukung lainnya yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam berjalannya penelitian yang dibuat oleh peneliti. Tujuan dari penelitian yang duat ini adalah untuk mengetahui bagaimana variabel PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mempengaruhi variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan atau indeks gini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 6 Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa serta menggunakan kurun waktu selama 7 tahun yaitu tahun 2010-2016 dengan total observasi sebanya 42 observasi.

Dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antar data cross section dan data time serries dengan menggunakan beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel dependen (variabel terikat)

Variabel dependen yang digunakan yaitu ketimpangan pendapatan atau indeks gini antar Kabupaten/Kota di Provinsi bali pada tahun 2010-2016 dengan satuan yang digunakan adalah persen.

## 2. Variabel independen (variabel bebas)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 yaitu:

- a. PDRB Perkapita antar Provinsi di Pulau Jawa pada Tahun 2010-2016 dengan satuan yang digunakan adalah satuan ribu rupiah.
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2016 dengan satuan yang digunakan adalah satuan persen.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2016 dengan satuan data yang digunakan adalah satuan persen.
- d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2016 dengan satuan data yang digunakan adalah satuan persen.

## 4.2 Hasil dan Analisis Data

### 4.2.1 Pemilihan Model Regresi

Dalam melakukan regresi data panel maka terdapat 3 model yang dapat digunakan dalam regresi data yaitu common effect, fixed effect dan random effect. Untuk memilih model mana yang paling tepat untuk digunakan maka perlu adanya dilakukan uji chow dan uji haustman. Hasil pengujian dalam pemilihan model yang tepat yaitu sebagai berikut:

#### 4.2.1.1 Chow test (uji F statistik)

Uji chow dilakukan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara model common effect effect dan model fixed effect menggunakan hipotesis berupa:

H0 : Common Effect Model / Pooled OLS

H1 : Fixed effect

Dalam melakukan pengujian ini yaitu dengan melihat p-value. Apabila p-value kurang dari 5% maka model yang tepat digunakan dalam uji ini adalah fixed effect. Namun apabila p-value lebih besar dari 1% maka model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah common effect.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: POOL01  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.761519	(5,32)	0.0023
Cross-section Chi-square	23.359312	5	0.0003

Sumber, data diolah

Nilai probabilitas cross-effect dengan menggunakan perhitungan evIEWS 8 adalah sebesar 0.0003 yang menandakan bahwa kurang dari  $\alpha$  1% yang hasilnya adalah signifikan menolak H0 dan gagal untuk menolak H1. Maka dengan hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan dalam uji chow ini adalah model estimasi fixed effect.

#### 4.2.1.2 Uji Hausman

Dengan menggunakan Uji Hausman yaitu untuk memilih manakah model yang paling tepat digunakan antara fixed effect dengan random effect dengan menggunakan hipotesis berupa:

$H_0$  = Random Effect

$H_1$  = Fixed Effect

Untuk memilih manakan uji yang paling tepat digunakan yaitu dilihat dari p-value. Apabila p-value kurang dari 1% maka uji yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect. Namun apabila p-value lebih dari 1% maka uji yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah random effect.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: POOL01  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.805179	4	0.0001

Sumber, data diolah

Nilai probabilitas cross-section random dengan menggunakan perhitungan eviews 8 adalah sebesar 0.0001 kurang dari  $\alpha$  1%, sehingga menolak  $H_0$  dan gagal menolak  $H_1$ . Maka dengan menggunakan uji hausman, model yang paling tepat digunakan adalah model estimasi fixed effect.

### 4.2.1.3 Model Estimasi Fixed Effect

Estimasi dengan model fixed effect merupakan teknik pengestimasi dengan menggunakan variabe dummy dengan tujuan untuk menangkap perbedaan intersep antar variabel namun dengan intersep waktu yang tetap sama. Model ini juga dapat mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slop) tetap antar variabel dan antar waktu.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Regresi Fixed Effect**

Dependent Variable: IG?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 01/03/18 Time: 00:19  
Sample: 2010 2016  
Included observations: 7  
Cross-sections included: 6  
Total pool (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.937868	0.303591	-3.089245	0.0041
PDRB?	1.68E-06	6.02E-07	2.796527	0.0087
IPM?	0.012682	0.002902	4.370389	0.0001
TPT?	0.012305	0.002671	4.606938	0.0001
TPAK?	0.003987	0.002108	1.890991	0.0677
Fixed Effects				
(Cross)				
_DKIJAKARTA--C	-0.243333			
_JAWABARAT--C	0.075935			
_JAWATENGAH--C				
C	0.064316			
_DIYOGYAKARTA				
A--C	0.002490			
_JAWATIMUR--C	0.076840			
_BANTEN--C	0.023752			

Sumber, data diolah

$$Y_{it} = -0.937868 + 0.00000168X_{1it} + 0.012682X_{2it} + 0.012305X_{3it} + 0.003987X_{4it} + U_{it}$$

Keterangan:

Y = Indeks Gini

$\beta_0$  = koefisien intersep

$\beta_1$  = koefisien pengaruh PDRB Perkapita (X1)

$\beta_2$  = koefisien pengaruh indeks pembangunan manusia (X2)

$\beta_3$  = koefisien pengaruh tingkat pengangguran terbuka (X3)

$\beta_4$  = koefisien pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (X4)

Dari tabel regresi dengan menggunakan model fixed effect diatas, dimana ketimpangan pendapatan sebesar 0,93% dengan menggunakan asumsi bahwa variabel independen yaitu PDRB Perkapita, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai berikut:

1. Ketika PDRB Perkapita naik sebesar 1 ribu, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.00000168 persen.
2. Ketika indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.012682 persen.
3. Ketika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.012305 persen.

4. Ketika tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik sebesar 1% maka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

### 4.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji Determinan ( $R^2$ )

Dengan melihat hasil yang diperoleh pada perhitungan model fixed effect, maka kemudian dapat diinterpretasikan terkait seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Uji Determinan ( $R^2$ )**

Variabel	Probabilitas F
PDRB Perkapita	R-squared = 0.769868
Indeks Pembangunan Manusia	
Tingkat Pengangguran Terbuka	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	

Sumber, data diolah

Dari data diatas dapat dilihat bagaimana pengaruh bagaimana pengaruh variabel bebas yang terdiri dari PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yaitu ketimpangan pendapatan sebesar 0.769868 ( 76,98%) yang sisanya (23,02%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen dalam penelitian ini.



### 4.3.2 Uji Parsial (Uji F)

Dalam uji parsial atau biasa disebut dengan uji F yaitu menunjukkan bagaimana variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Tujuan dilakukan uji f ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaruh variabel PDRB Perkapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara bersama-sama terhadap variabel ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa yaitu dengan membandingkan antara nilai probabilitas F dengan nilai  $\alpha$  sebesar 1% (0,01), sehingga dengan begitu dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh variabel PDRB Perkapita, indeks pembangunan manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara bersama-sama terhadap variabel ketimpangan pendapatan.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Parsial (Uji F)**

Variabel	Probabilitas F
PDRB Perkapita	0.000000
Indeks Pembangunan Manusia	
Tingkat Pengangguran Terbuka	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	

Sumber, data diolah

Penggunaan Uji F ini untuk mengetahui mungkinkah variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen. Jika dilihat dari tabeh hasil Uji F, nilai Prob (F-statistik) yaitu 0.000000 lebih kecil dari  $\alpha = 1\%$  ( $0.000000 < 0,01$ ) yang menunjukkan bahwa antara variabel PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat

pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

### 4.3.3 Uji Individu (Uji T)

Uji individu atau sering di sebut uji t sebenarnya mampu menunjukkan sejauh mana pengaruh yang diakibatkan oleh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Dengan uji t ini dapat dilihat dari *model fixed effect* diatas. Tujuan dari hipotesis ini yaitu bagaimana variabel PDRB Perkapita, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) serta tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara individual terhadap variabel ketimpangan pendapatan yaitu dengan membandingkan antara nilai probabilitas t dengan nilai  $\alpha$  yaitu 1% atau 0,01 agar dapat diketahui apakah hasilnya menolak atau menerima hipotesis.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Individu (Uji T)**

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
PDRB Perkapita	0.00000168	0.0087	Signifikan
IPM	0.012682	0.0001	Signifikan
TPT	0.012305	0.0001	Signifikan
TPAK	0.003987	0.0677	Tidak Signifikan

Sumber, data diolah

#### a) Pengaruh PDRB perkapita terhadap ketimpangan pendapatan

Dari hasil uji t yang diperoleh dari perhitungan model fixed effect maka variabel PDRB Perkapita mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.00000168 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0087 yang mana nilai probabilitasnya lebih kecil dari pada  $\alpha$  yaitu ( $0.0087 < 0.01$ ), yang menandakan bahwa PDRB Perkapita memiliki hubungan positif dan

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tidak terbukti serta tidak dapat diterima.

**b) Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan**

Dari hasil uji t yang diperoleh dari perhitungan model fixed effect maka variabel indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.012682 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0001 yang mana nilai probabilitasnya lebih kecil dari pada  $\alpha$  yaitu ( $0.0001 < 0.01$ ), yang menandakan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian hipotesis ketiga yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tidak terbukti serta tidak dapat diterima.

**c) Pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan**

Dari hasil uji t yang diperoleh dari perhitungan model fixed effect maka variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.012305 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0001 yang mana nilai probabilitasnya lebih kecil dari pada  $\alpha$  yaitu ( $0.0001 < 0.01$ ), yang menandakan bahwa tingkat

pengangguran terbuka memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian hipotesis keempat yaitu tingkat pengangguran terbuka berpengaruh (TPT) positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa terbukti serta dapat diterima.

**d) Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan**

Dari hasil uji t yang diperoleh dari perhitungan model fixed effect maka variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.003987 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.0677 yang mana nilai probabilitasnya lebih besar dari pada  $\alpha$  yaitu ( $0.0677 < 0.01$ ), yang menandakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan demikian hipotesis keempat yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tidak terbukti serta tidak dapat diterima.

#### 4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Dengan menggunakan uji fixed effect, maka persamaan yang akan didapat ialah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} - \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} - \beta_4 TPAK_{it} + U_{it}$$

$$Y_{it} = -0.937868 + 0.00000168X1_{it} + 0.012682X2_{it} + 0.012305X3_{it} + 0.003987X4_{it} + U_{it}$$

Hasil intrepertasi dari hasil regresi diatas, maka dapat dijelaskan terjadinya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

##### 1. Analisis pengaruh PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan

Dari model estimasi fixed effect, diketahui bahwasannya hasil yang diperoleh yaitu adanya pengaruh PDRB Perkapita secara signifikan terhadap terjadinya ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa. Hasil perolehan nilai koefisien dari PDRB Perkapita yaitu sebesar 0.00000168 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0.0087 yang menandakan bahwa ketika PDRB Perkapita naik sebesar 1 ribu maka akan mampu menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.00000168%. hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartini , 2017) yaitu dimana hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan. Hipotesis ini juga sesuai dengan teori kuznet

yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek antara PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan terdapat hubungan yang positif.

## **2. Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan**

Dari model estimasi fixed effect, diketahui bahwasannya hasil yang diperoleh yaitu adanya pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) secara signifikan terhadap terjadinya ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa. Hasil perolehan nilai koefisien dari indeks pembangunan manusia (IPM) yaitu sebesar 0.012682 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0.0001 yang menandakan bahwa ketika indeks pembangunan manusia (IPM) naik sebesar 1 persen maka akan mampu menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.012682%. hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arif & Wicaksani, 2017). Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan Tahun 2011-2015 adalah positif dan signifikan. Dengan adanya tingkat harapan hidup yang tinggi di Provinsi Jawa Timur maka akan menciptakan tenaga kerja yang tinggi dan kemudian akan mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Tetapi hal ini terjadi hanya pada daerah tertentu seperti daerah yang menjadi pusat perekonomian maupun daerah yang memiliki pendapatan tinggi saja, sehingga membuat pertumbuhan antar daerah menjadi tidak merata dan menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan.

### **3. Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan**

Dari model estimasi fixed effect, diketahui bahwasannya hasil yang diperoleh yaitu adanya pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara signifikan terhadap terjadinya ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa. Hasil perolehan nilai koefisien dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu sebesar 0.012305 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0.0001 yang menandakan bahwa ketika tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik sebesar 1% maka akan mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.012305%. hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rose & Sovita, 2016) yaitu dimana hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tingkat pengangguran yang tinggi pada Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa mengindikasikan masih adanya faktor produksi (tenaga kerja) yang masih belum diserap secara optimal dalam menunjang pembangunan di setiap wilayah. Meningkatnya pengangguran terbuka maka menandakan bahwa banyaknya jumlah penduduk yang tidak memperoleh pendapatan dan kemudian akan berdampak pada PDRB perkapita yang rendah. Rendahnya PDRB perkapita ini tidak hanya menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang rendah, namun juga pada pembangunan di wilayah tersebut. Sehingga dengan adanya perbedaan

pembangunan antar wilayah akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah semakin melebar.

#### **4. Analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan**

Dari model estimasi fixed effect, diketahui bahwasannya hasil yang diperoleh yaitu adanya pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara signifikan terhadap terjadinya ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa. Hasil perolehan nilai koefisien dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu sebesar 0.003987 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0.0677 yang menandakan bahwa ketika tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik sebesar 1% maka tidak akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hipotesis ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darzal, 2016) yaitu dimana hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja maka membuat para angkatan kerja semakin meningkat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang meningkat maka akan mampu meningkatkan hasil output yang dihasilkan dengan asumsi bahwa jumlah tenaga kerja yang meningkat juga disertai dengan produktivitas yang meningkat. Apabila output yang dihasilkan semakin meningkat dengan adanya produktivitas tenaga kerja yang semakin baik maka akan



mampu meningkatkan pendapatan yang diperoleh seseorang juga semakin meningkat.

#### 4.5 Analisis antar Provinsi di Pulau Jawa

Dari hasil pengolahan data menggunakan eviews 8, maka dapat dijelaskan bahwa nilai intersep dari masing masing provinsi yang terdapat di Pulau Jawa terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan dibawah berikut ini:

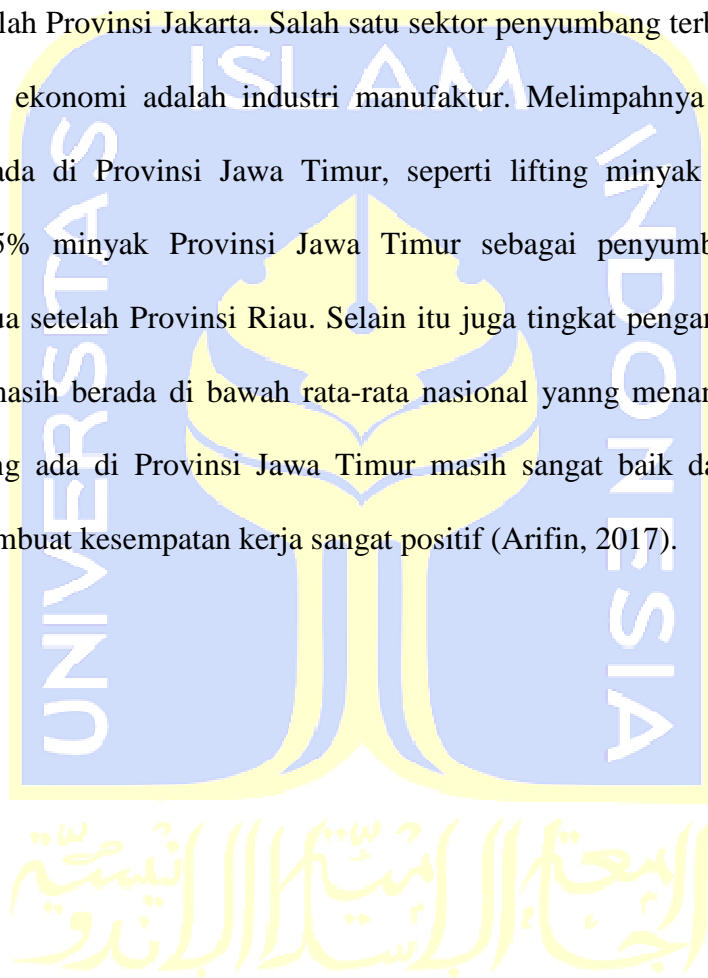
**Tabel 4.7**  
**Perbedaan Koefisien antar Provinsi di Pulau Jawa**

Provinsi	Koefisien C	Koefisien antar Provinsi	Hasil
DKI Jakarta	-0.937868	-0.243333	-1.181201
Jawa Barat	-0.937868	0.075935	-0.861933
Jawa Tengah	-0.937868	0.064316	-0.873552
DI Yogyakarta	-0.937868	0.002490	-0.935378
Jawa Timur	-0.937868	0.076840	-0.861028
Banten	-0.937868	0.023752	-0.914116

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui manakah Provinsi di Pulau jawa yang memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi dan terendah. Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi di Pulau jawa dengan nilai intersep sebesar 1.181201 selain itu Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat ketimpangan pendapatan terendah di Pulau jawa yaitu dengan nilai intersep sebesar 0.861028. Tingginya ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta disebabkan karena PDRB Perkapita yang termasuk paling tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang terdapat di Pulau jawa. Adanya PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta yang tinggi namun juga masih disertai

dengan tingginya tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta yang berada sedikit di atas rata-rata Nasional. Tingginya pengangguran ini disebabkan karena masih belum optimal dalam penggunaan faktor produksi dalam menunjang pembangunan (Rose & Sovita, 2016). Selain itu adanya pengaruh dari tingginya tindak kriminalitas yaitu pada awal tahun 2015 berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit mencatat bahwa Provinsi DKI Jakarta masuk kedalam urutan terakhir dari 50 kota besar di dunia. Tindak kejahatan yang masih sering terjadi di Provinsi Jakarta yaitu seperti kasus perampasan, penimpunan, begal, perampokan serta pembunuhan yang kemudian berdampak terjadinya ketimpangan ekonomi yang masih terjadi antar kawasan maupun antar kelas masyarakat. Selain itu juga Provinsi DKI Jakarta masih mengalami permasalahan dalam pengetasan kemiskinan dan tidak dipungkiri bahwa Provinsi DKI atau sering disebut dengan Kota Metropolitan yang mana 70% terjadinya perputaran uang negeri berada di Provinsi tersebut membuktikan bahwa perputaran uang tidak mampu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI. Banyaknya jumlah penduduk juga penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi DKI Jakarta serta tingginya pengeluaran perkapita DKI pada tahun 2016 yang melebihi rata rata pengeluaran perkapita Nasional sehingga menyebabkan tingginya gap antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin . Hal ini dikarena Provinsi DKI Jakarta bukan menggunakan sektor pertanian sebagai tumpuan. Namun sektor yang diunggulkan yaitu sektor keuangan, persewaan, jasa, perusahaan, perdagangan hotel, restoran dan industri pengolahan (Pratomo, 2012). Selain itu, Provinsi Jawa Timur yang memiliki

tingkat ketimpangan terendah di Pulau Jawa dikarenakan PDRB Perkapita semakin yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena perekonomian Provinsi di Jawa timur mulai membaik dan kemudian membuat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur semakin meningkat. (Arif & Wicaksani, 2017). Provinsi Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi setelah Provinsi Jakarta. Salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah industri manufaktur. Melimpahnya sumber daya alam yang ada di Provinsi Jawa Timur, seperti lifting minyak yang hampir mencapai 25% minyak Provinsi Jawa Timur sebagai penyumbang nasional terbesar kedua setelah Provinsi Riau. Selain itu juga tingkat pengangguran tahun 2010-2016 masih berada di bawah rata-rata nasional yang menandakan bahwa investasi yang ada di Provinsi Jawa Timur masih sangat baik dan terlindungi sehingga membuat kesempatan kerja sangat positif (Arifin, 2017).



## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dengan adanya dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu PDRB Perkapita, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan yang dilihat melalui variabel indeks gini antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016. Adapun hasil yang analisis yang diperoleh maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect. Hasil yang diperoleh dalam uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah variabel independen yang terdiri dari PDRB Perkapita, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memperoleh angka sebesar 0.769868 atau sebesar 76.98%. adapun sisanya yaitu sebesar 23,02% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.
2. Hubungan Variabel PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan adalah signifikan. Hasil koefisien yang diperoleh yaitu sebesar 0.00000168 yang menandakan bahwa apabila PDRB Perkapita naik sebesar 1 ribu maka akan mampu meningkatkan ketimpangan

pendapatan sebesar 0.00000168 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis karena semakin tinggi PDRB Perkapita akan mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa.

3. Hubungan Variabel indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan adalah signifikan. Hasil koefisien yang diperoleh yaitu sebesar 0.012682 yang menandakan bahwa apabila indeks pembangunan manusia (IPM) naik sebesar 1 persen maka akan mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.012682 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis karena semakin tinggi indeks pembangunan manusia (IPM) akan mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa.
4. Hubungan Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan adalah signifikan. Hasil koefisien yang diperoleh yaitu sebesar 0.012305 yang menandakan bahwa apabila tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik sebesar 1 persen maka akan mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.012305 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis karena semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka (TPT) akan mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa.
5. Hubungan Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan adalah tidak signifikan. Hasil koefisien yang diperoleh yaitu sebesar 0.003987 yang menandakan bahwa apabila tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami

kenaikan sebesar 1 persen maka tidak akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dilakukan bahwa karena tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. karena semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) maka akan mampu meningkatkan hasil output yang dihasilkan dengan asumsi bahwa jumlah tenaga kerja yang meningkat juga disertai dengan produktivitas yang meningkat. Apabila output yang dihasilkan semakin meningkat dengan adanya produktivitas tenaga kerja yang semakin baik maka akan mampu meningkatkan pendapatan yang diperoleh juga semakin meningkat.

## 5.2 Implikasi

1. Variabel PRDB Perkapita, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah antar Provinsi di Pulau Jawa untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas sumber daya alam dengan adanya kebijakan yang diharapkan mampu untuk menghilangkan adanya gap antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah sehingga permasalahan ketimpangan pendapatan dapat diatasi. Selain itu perlu

adanya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga tidak terjadi lagi adanya pengangguran.

2. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka output yg dihasilkan juga akan meningkat. Apabila semakin tinggi angka partisipasi angkatan kerja namun tidak disertai dengan produktivitas yang tinggi maka tidak akan mampu menghasilkan output yang tinggi pula. Sehingga perlu adanya pembekalan bagi para angkatan kerja dalam meningkatkan produktivitas yaitu diadakannya kegiatan pelatihan bagi para calon pekerja.
3. Perlu adanya peran pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan dengan lebih mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap dampak secara menyeluruh bagi masyarakat. Sehingga tidak terjadi lagi adanya gap antar kelompok masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal URECOL*, Hal 323-328.
- Arifin, Zainul. (2017) Industri Manufaktur Jadi Pendorong Ekonomi Jatim di 2017. Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2017.  
<http://bisnis.liputan6.com/read/3210627/industri-manufaktur-jadi-pendorong-ekonomi-jatim-di-2017>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Indeks Pembangunan Masyarakat 2013*. Jakarta-Indonesia: Publikasi Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Gini Rasio Menurut provinsi Tahun 2008-2013. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2017.  
<https://sulsel.bps.go.id/statictable/2015/05/22/19/gini-ratio-menurut-provinsi-2008-2013.html>
- Badan Pusat Statistik. (2016). Gini Rasio Menurut provinsi 2014-2016. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2017.  
<https://sulsel.bps.go.id/dynamictable/2016/10/02/342/gini-ratio-menurut-provinsi-2014-2016.html>
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010*. Jakarta: Publikasi Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014 :Metode baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.



Badan Pusat Statistik. (2015). Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2016 (Metode Baru). Diakses Pada Tanggal 21 April 2017.

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/06/16/1211/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi-2010-2016-metode-baru-.html>

Badan Pusat Statistik. (2016). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2016. Jakarta. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. (2017). [Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2010-2016 (Ribu Rupiah). Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2017.

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/958/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2016-ribu-rupiah-.html>

Badan Pusat Statistik. (2017). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 1986 - 2017. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2017.

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2017.html>

Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014 :Metode baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2011). *Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010*. Jakarta: Publikasi Badan Pusat Statistik.

Bappenas. (2016). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi, 1986-2016.

<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/data-dan-statistik1/kemiskinan-ketenagakerjaan-dan-usaha-kecil-menengah/>

Danawati, S., Bendesa, I., & Utama, M. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan kerja, Pertumbuhan

Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi*, Hal 2123-2160.

Darzal. (2016). Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol 4.

Djojohadikusumo, S. (1954). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pembangunan.

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Ghozali, C. (2002). *Statistik Non Parametrik : Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartini , N. T. (2017). Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015, 2017, 2017. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol 6.

Hutabarat, D. E. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Stindo Profesional*, Vol 4.

Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

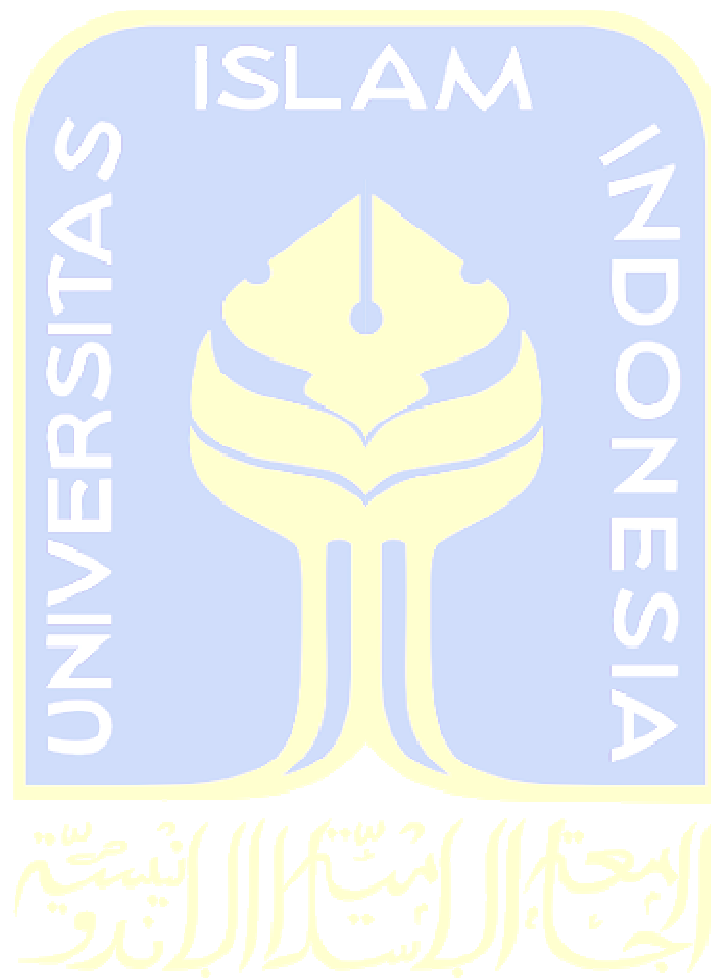
Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 2.

Pratomo, Marwanto Bimo. (2012). DKI Jakarta Penyumbang Terbesar Ekonomi Nasional. Di akses Pada Tanggal 29 Desember 2017.

<https://www.merdeka.com/uang/dki-jakarta-penyumbang-terbesar-ekonomi-nasional.html>

- Rosa, Y. D., & Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Jurnal Menara Ekonomi*, Vol II.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* . Jakarta: Rajawali Pres.
- Soediyono. (1992). *Teori Ekonomi Mikro: Penantar Analisis Pendapatan Nasional Yogya*. Yogyakarta: Liberti.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2005). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi: Pengantar Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal EKSOS*, Hal 195-211.
- T, D. P., & Purbadharmaja, I. B. (2017). Pengaruh IPM, Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 6.
- Tarigan , R. (2004). *Ekonomi Regional: Toeri dan Aplikasi*. Jakarta: terjemah Bumi Aksara.
- Todaro, M. (2006). *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga* . Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* . Yogyakarta: Ekonisia.

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.





**LAMPIRAN**

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## LAMPIRAN I

### Data Indeks gini, PDRB perkapita, IPM, TPT, TPAK antar Provinsi di

#### Pulau Jawa Tahun 2010-2016

Provinsi	Tahun	IG (%)	PDRB (ribuan)	IPM (%)	TPT (%)	TPAK (%)
DKI Jakarta	2010	0,36	111528	76,31	11,05	67,83
DKI Jakarta	2011	0,44	117672	76,98	11,80	69,30
DKI Jakarta	2012	0,42	123962	77,53	10,72	71,47
DKI Jakarta	2013	0,43	130060	78,08	9,94	67,79
DKI Jakarta	2014	0,43	136312	78,39	9,84	66,61
DKI Jakarta	2015	0,43	142892	78,99	8,36	66,39
DKI Jakarta	2016	0,41	149779	79,60	5,77	66,91
Jawa Barat	2010	0,36	20974	66,15	10,33	62,38
Jawa Barat	2011	0,41	21976	66,67	9,96	61,34
Jawa Barat	2012	0,41	23036	67,32	9,08	63,64
Jawa Barat	2013	0,41	24118	68,25	9,16	62,82
Jawa Barat	2014	0,41	24966	68,80	8,45	62,77
Jawa Barat	2015	0,41	25842	69,50	8,72	60,34
Jawa Barat	2016	0,41	26921	70,05	8,89	60,65
Jawa Tengah	2010	0,34	19209	66,08	6,21	70,60
Jawa Tengah	2011	0,38	20053	66,64	7,07	70,15
Jawa Tengah	2012	0,38	20950	67,21	5,61	71,26
Jawa Tengah	2013	0,39	21844	68,02	6,01	70,43
Jawa Tengah	2014	0,38	22819	68,78	5,68	69,68
Jawa Tengah	2015	0,38	23887	69,49	4,99	67,86
Jawa Tengah	2016	0,37	24967	69,98	4,63	67,15
DI Yogyakarta	2010	0,41	18652	75,37	7,41	69,76
DI Yogyakarta	2011	0,40	19387	75,93	5,57	70,15
DI Yogyakarta	2012	0,43	20183	76,15	5,03	71,37

DI Yogyakarta	2013	0,44	21037	76,44	6,57	69,29
DI Yogyakarta	2014	0,42	21867	76,81	6,35	71,05
DI Yogyakarta	2015	0,43	22688	77,59	5,52	68,38
DI Yogyakarta	2016	0,42	23566	78,38	2,72	71,96
Jawa Timur	2010	0,34	26371	65,36	4,25	69,08
Jawa Timur	2011	0,37	27864	66,06	5,33	68,06
Jawa Timur	2012	0,36	29508	66,74	4,09	69,60
Jawa Timur	2013	0,36	31092	67,55	4,30	69,78
Jawa Timur	2014	0,37	32703	68,14	4,19	68,12
Jawa Timur	2015	0,42	34272	68,95	4,47	67,84
Jawa Timur	2016	0,40	35962	69,74	4,21	66,14
Banten	2010	0,42	25397	67,54	13,68	65,34
Banten	2011	0,40	26548	68,22	13,06	65,61
Banten	2012	0,39	27716	68,92	10,13	65,17
Banten	2013	0,40	28910	69,47	9,90	63,55
Banten	2014	0,40	29846	69,89	9,07	63,84
Banten	2015	0,40	30799	70,27	9,55	62,24
Banten	2016	0,39	31761	70,96	8,92	63,66

الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور

## LAMPIRAN II

### Regresi Pooled Least Square (*Common Effect*)

Dependent Variable: IG?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 01/03/18 Time: 00:18  
Sample: 2010 2016  
Included observations: 7  
Cross-sections included: 6  
Total pool (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.131798	0.083064	1.586706	0.1211
PDRB?	-2.18E-07	9.67E-08	-2.249779	0.0305
IPM?	0.005401	0.000843	6.406481	0.0000
TPT?	0.002315	0.001297	1.784370	0.0826
TPAK?	-0.001886	0.001065	-1.770454	0.0849
R-squared	0.598654	Mean dependent var	0.398333	
Adjusted R-squared	0.555265	S.D. dependent var	0.026404	
S.E. of regression	0.017608	Akaike info criterion	-5.129559	
Sum squared resid	0.011472	Schwarz criterion	-4.922694	
Log likelihood	112.7207	Hannan-Quinn criter.	-5.053735	
F-statistic	13.79742	Durbin-Watson stat	1.579183	
Prob(F-statistic)	0.000001			

الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور



### LAMPIRAN III

#### Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: IG?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 01/03/18 Time: 00:19  
 Sample: 2010 2016  
 Included observations: 7  
 Cross-sections included: 6  
 Total pool (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.937868	0.303591	-3.089245	0.0041
PDRB?	1.68E-06	6.02E-07	2.796527	0.0087
IPM?	0.012682	0.002902	4.370389	0.0001
TPT?	0.012305	0.002671	4.606938	0.0001
TPAK?	0.003987	0.002108	1.890991	0.0677
Fixed Effects (Cross)				
_DKIJAKARTA—				
C	-0.243333			
_JAWABARAT—C	0.075935			
_JAWATENGAH—				
C	0.064316			
_DIYOGYAKARTA				
A—C	0.002490			
_JAWATIMUR—C	0.076840			
_BANTEN—C	0.023752			

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.769868	Mean dependent var	0.398333
Adjusted R-squared	0.705144	S.D. dependent var	0.026404
S.E. of regression	0.014337	Akaike info criterion	-5.447638
Sum squared resid	0.006578	Schwarz criterion	-5.033907
Log likelihood	124.4004	Hannan-Quinn criter.	-5.295989
F-statistic	11.89455	Durbin-Watson stat	2.279619
Prob(F-statistic)	0.000000		

## LAMPIRAN IV

### Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: IG?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/03/18 Time: 00:19

Sample: 2010 2016

Included observations: 7

Cross-sections included: 6

Total pool (balanced) observations: 42

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.131798	0.067634	1.948688	0.0589
PDRB?	-2.18E-07	7.87E-08	-2.763030	0.0089
IPM?	0.005401	0.000686	7.868018	0.0000
TPT?	0.002315	0.001056	2.191445	0.0348
TPAK?	-0.001886	0.000867	-2.174355	0.0361
Random Effects				
(Cross)				
_DKIJAKARTA—C	0.000000			
_JAWABARAT—C	0.000000			
_JAWATENGAH—C	0.000000			
_DIYOGYAKARTA—C	0.000000			
_JAWATIMUR—C	0.000000			
_BANTEN—C	0.000000			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.014337	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.598654	Mean dependent var	0.398333	
Adjusted R-squared	0.555265	S.D. dependent var	0.026404	
S.E. of regression	0.017608	Sum squared resid	0.011472	
F-statistic	13.79742	Durbin-Watson stat	1.579183	
Prob(F-statistic)	0.000001			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.598654	Mean dependent var	0.398333	
Sum squared resid	0.011472	Durbin-Watson stat	1.579183	

## LAMPIRAN V

### Hasil Regresi Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: POOL01

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.761519	(5,32)	0.0023
Cross-section Chi-square	23.359312	5	0.0003

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IG?

Method: Panel Least Squares

Date: 01/03/18 Time: 00:20

Sample: 2010 2016

Included observations: 7

Cross-sections included: 6

Total pool (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.131798	0.083064	1.586706	0.1211
PDRB?	-2.18E-07	9.67E-08	-2.249779	0.0305
IPM?	0.005401	0.000843	6.406481	0.0000
TPT?	0.002315	0.001297	1.784370	0.0826
TPAK?	-0.001886	0.001065	-1.770454	0.0849

R-squared	0.598654	Mean dependent var	0.398333
Adjusted R-squared	0.555265	S.D. dependent var	0.026404
S.E. of regression	0.017608	Akaike info criterion	-5.129559
Sum squared resid	0.011472	Schwarz criterion	-4.922694
Log likelihood	112.7207	Hannan-Quinn criter.	-5.053735
F-statistic	13.79742	Durbin-Watson stat	1.579183
Prob(F-statistic)	0.000001		

## LAMPIRAN VI

### Regresi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOL01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.805179	4	0.0001

\*\* WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB?	0.000002	-0.000000	0.000000	0.0014
IPM?	0.012682	0.005401	0.000008	0.0098
TPT?	0.012305	0.002315	0.000006	0.0000
TPAK?	0.003987	-0.001886	0.000004	0.0022

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IG?

Method: Panel Least Squares

Date: 01/03/18 Time: 00:21

Sample: 2010 2016

Included observations: 7

Cross-sections included: 6

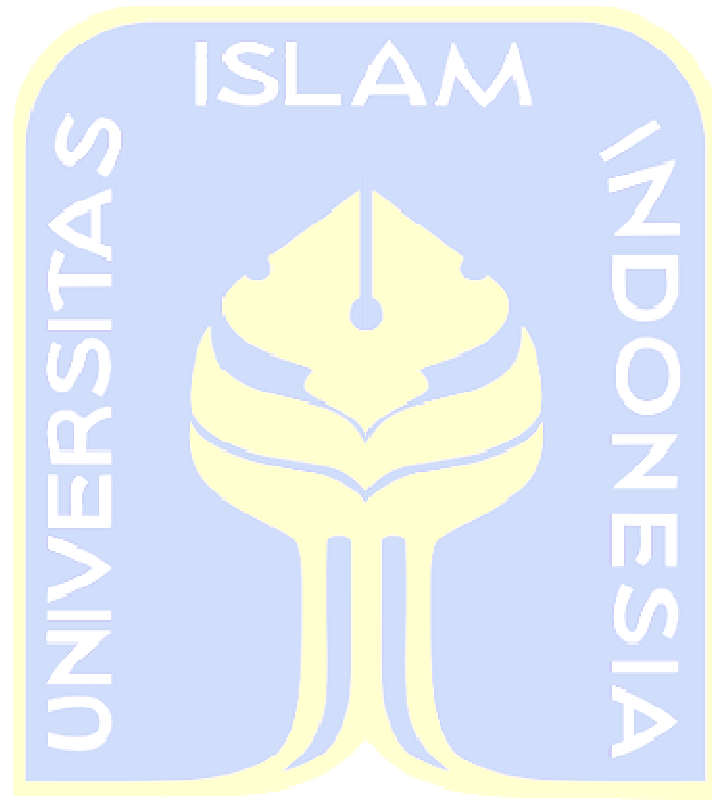
Total pool (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.937868	0.303591	-3.089245	0.0041
PDRB?	1.68E-06	6.02E-07	2.796527	0.0087
IPM?	0.012682	0.002902	4.370389	0.0001
TPT?	0.012305	0.002671	4.606938	0.0001
TPAK?	0.003987	0.002108	1.890991	0.0677

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.769868	Mean dependent var	0.398333
Adjusted R-squared	0.705144	S.D. dependent var	0.026404
S.E. of regression	0.014337	Akaike info criterion	-5.447638
Sum squared resid	0.006578	Schwarz criterion	-5.033907
Log likelihood	124.4004	Hannan-Quinn criter.	-5.295989
F-statistic	11.89455	Durbin-Watson stat	2.279619
Prob(F-statistic)	0.000000		



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية